

BELUM DIKOREKSI

RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI
DENGAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)

- Tahun Sidang : 2016-2017
- Masa Persidangan : I
- Rapat ke :
- Sifat : Terbuka
- Jenis Rapat : Rapat Kerja
- Hari/tanggal : Senin, 5 September 2016
- Waktu : Pukul 13.25s.d 17.45 WIB
- Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
- Acara : Membicarakan mengenai :
1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Polri;
 2. Penanganan kasus yang menarik perhatian publik seperti Terorisme dan Perdagangan Orang; dan berbagai kejahatan yang seringkali terjadi, baik yang merupakan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.
 3. Realisasi 11 (sebelas) Program Prioritas dan 10 (sepuluh) Komitmen Kapolri.
 4. Realisasi Anggaran Semester I tahun 2016 dan temuan BPK.
 5. Tindak lanjut kesimpulan dan pengaduan masyarakat yang telah disepakati dan diserahkan dalam Rapat Kerja sebelumnya.

KETUA RAPAT (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, SH., MH/F-GERINDRA):

Bisa kita mulai?
Tolong wartawan ya.

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Salam sejahtera bagi kita semua,
Bapak/Ibu Anggota Komisi III DPR RI yang berbahagia pada hari ini,
Pak Kapolri, Pak calon Wakapolri, beserta jajaran kepolisian Republik Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu per satu.
Hadirin yang kami muliakan,**

Hari ini laporan dari Sekretariat dihadiri oleh 29 Anggota, 10 Fraksi. Jadi sudah kuorum sesuai dengan Pasal 251. Untuk itu sekarang sudah 14.30 saya minta masukan kira-kira kita selesaikan sampai jam berapa?
Pak Kapolri sampai jam 16.00?

(RAPAT : SETUJU)

Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kapolri untuk memaparkan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Komisi III.
Kami persilakan.

KAPOLRI:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,**

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR Ri,
Wakil Pimpinan Komisi III, para Anggota Komisi III DPR RI, hadirin serta peserta rapat yang berbahagia,**

Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat karunia-Nya kita dapat bersama-sama bertemu dalam rapat ini dan kebahagiaan kami juga setelah sekian lama tidak bertemu dengan rekan-rekan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III. Kami dalam rapat ini kami laporkan pada Pimpinan bahwa Bapak Wakapolri meminta ijin karena dalam rangka persiapan untuk menghadapi fit and proper test Kepala BIN yang akan direncanakan hari Rabu. Beliau sedang mempersiapkan bahan-bahannya termasuk sedang melaksanakan rapat juga internal hari ini.

Kemudian pada kesempatan ini kami didampingi sejumlah pejabat utama, sekaligus beberapa Kapolda yang terkait dengan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang cukup teknis dalam lembar pertanyaan yang diajukan kepada kami beberapa hari yang lalu. Sehingga untuk itu kami mengundang Kapolda-kapolda yang terkait agar nanti jawabannya dapat lebih akurat juga. Diantaranya adalah Kapolda Metro Jaya, hadir Pak ya? Kemudian Kapolda Jabar dan Jateng. Ini terutama kalau nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan persiapan arus mudik dalam rangka Idul Adha yang

beberapa hari lagi, akhir minggu ini. Bagaimana persiapan-persiapan kita nanti, meskipun tidak masuk dalam pertanyaan disini. Kemudian juga kami undang Kapolda dari Kalimantan Timur karena ada perkaitan. Kemudian juga ada Kapolda ada Riau dan Kapolda Sulawesi Tengah yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan misalnya operasi di Poso, kebakaran hutan dan lain-lain. Jadi ada sejumlah Kapolda yang memang sengaja kami undang kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu.

Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat,

Sesuai dengan surat undangan Komisi III maka ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada kami terutama menyangkut masalah-masalah, kasus yang menarik perhatian masyarakat. Kemudian realisasi dari 11 program prioritas, tindak lanjut atas kesimpulan rapat tanggal 20 April yang lalu dan pengaduan masyarakat yang disampaikan pada Rapat Kerja tersebut serta realisasi anggaran semester I serta temuan BPK Republik Indonesia.

Kami mulai dengan penanganan sejumlah kasus yang menarik perhatian masyarakat. Yang pertama adalah kasus tentang transaksi peredaran narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh Saudara Fredy Budiman kepada Haris Azhar. Setelah kasus ini disampaikan dalam bentuk pernyataan di media social oleh Saudara Haris Azhar yang kemudian menjadi viral maka kami telah membentuk tim pencari fakta. Awalnya memang tim ini kita bentuk cukup dari Propam dan dari Diphumas dengan 2 langkah. Karena kami melihat informasi ini perlu ditindak lanjuti. Kadiv Humas saya minta untuk bertemu dengan Saudara Haris Azhar untuk menanyakan informasi persisnya seperti apa dan apakah ada fakta-fakta yang dipilih detail.

Kemudian yang kedua, Kadiv Propam saya minta untuk melakukan 2 hal. Karena didalam pernyataan yang disampaikan oleh Saudara Haris Azhar itu mengatakan ada nama-nama. Ada 3 point sebetulnya yang disampaikan oleh Saudara Haris Azhar yaitu adanya pejabat Polri yang menerima uang 90 Miliar dari Fredy Budiman, kemudian dari BNN 450 Miliar, dan satu lagi mengenai adanya anggota dari TNI yang katanya mengawal perjalanan dari Medan sampai dengan Jakarta. Nah kami utamanya tentu berkepentingan untuk menindaklanjuti, mengecek apakah betul ada pejabat Polri yang menerima uang sebanyak 90 Miliar itu. Dan menurut yang bersangkutan Haris Azhar bahwa itu ada didalam pleidoy dan sekaligus pengacaranya sudah mengetahui tapi yang bersangkutan belum membaca pleidoy maupun belum mengetahui. Belum bertemu dengan pengacaranya. Oleh karena itu setelah pertemuan Pak Boy Rafli, Kadiv Humas tidak banyak informasi yang berbeda dengan yang disampaikan kepada public. Dan kemudian dari Kadiv Propam sudah mendapatkan pleidoy yang bersangkutan dari PN Jakarta Barat sekaligus juga sudah bertemu dengan penasehat hukum dari Freddy Budiman yang dua-duanya mengatakan tidak ada, tidak pernah mendengar bahwa yang bersangkutan Freddy Budiman memberikan uang ke pejabat Polri sebanyak 90 Miliar. Belum pernah mendengar. Ini sudah kita BAP. Dengan dasar itu kemudian dari TNI maupun dari BNN membuat laporan tentang ITE. Jadi kami ulangi, yang beredar di public menyatakan bahwa laporan terhadap Saudara Haris Azhar adalah pencemar nama baik, itu tidak. Bukan laporan pencemaran nama baik sebagaimana tercantum dalam KUHP karena pencemaran nama baik itu tidak bisa dilakukan terhadap non individual, harus dilakukan terhadap individual. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE (Informasi

Teknologi Elektronik) yang mana salah satu pasalnya menyatakan tidak boleh menyebarkan berita bohong. Kenapa? Karena dampak dari pemberitaan di ITE itu sudah diperhitungkan. Itu akan dapat berbahaya. Kalau viral semua orang bisa memuat, mengupload dan itu viral di media social, itu dapat membuat masyarakat menjadi missed leading, seperti kasus Tanjung Balai untuk tiral informasi yang tidak benar dengan cepat itu terjadi peristiwa kerusuhan. Nah oleh karena itu untuk mencegah bahwa ini tidak viral maka kemudian baik dari BNN maupun dari TNI dan dari Polri melaporkan tentang hal itu. Kenapa? Karena sudah 2 informasi yang disampaikan dalam pernyataan itu ternyata dua-duanya mengatakan tidak ada *pleidoy* maupun pengacaranya dan sudah di berita acara. Nah kemudian sambil ini berjalan kemudian kita membentuk juga tim lebih lengkap lagi yaitu tim pencari fakta. Khusus untuk Polri kita membuat kalau nanti informasi ini ditangani oleh tim Polri yang kami khawatirkan nanti akan timbul dugaan kita akan menutup-nutupi. Kita akan membela dan seterusnya. Kami berkomitmen Polri, kita tidak akan pernah untuk membela kalau ada anggota kita yang salah apalagi terlibat dalam jaringan narkoba. Bagi kita itulah kesalahan yang sangat fatal dan ini perlu untuk dipotong. Kira-kira demikian.

Oleh karena itu kita membuat tim yang lebih besar yaitu tim dari Polri yang dipimpin oleh Bapak Irwasum yang berjumlah 15 orang plus 3 orang eksternal. Yaitu mulai dari Kompolnas Ibu Pungky. Yang dulunya adalah Direktur Imparsial, kemudian yang kedua adalah Bapak Hendar di dari setara institute dan dari akademisinya Bapak Effendy Gozali. Kemudian kami menyampaikan kepada Bapak Irwasum, ajak dan kemudian laksanakan kegiatan investigasi oleh tim ini apa pun juga terbuka saja. Karena prinsip kita sangat komit penanganan narkoba tidak pernah kita tolerir termasuk yang dilakukan oleh anggota sendiri. Tim ini sudah bergerak cukup banyak. Mulai dari melakukan klarifikasi dengan mantan Kalapas di Nusa Kambangan, kemudian ada pendeta dan juga ada napi yang ada disana. Kemudian pleidoynya dibaca, pemeriksaan 11 orang napi yang ada di Lapas, di Salemba, di Tangerang, di Cipinang, kemudian memeriksa aliran dana melalui PPATK yang dari Freddy Budiman, kita belum menemukan ada aliran dana dari Freddy Budiman kepada anggota Polri. Kemudian ada video juga yang kita peroleh dari Menteri Kumham Pak Laoly yang saya terima langsung dan saya langsung serahkan kepada Pak Irwasum dan saya meminta kepada Pak Irwasum agar silakan saja di tonton bersama-sama dengan tim yang dari eksternal, dari Pak Endardy, Effendy Gozali dan Ibu Pungky. Semua silakan menonton sama-sama. Dari video tersebut disampaikan disana tidak ada menyebut Freddy tidak pernah menyebut mengenai adanya aliran dana kepada Anggota Polri apalagi yang jumlahnya 90 Miliar, tidak ada. Yang ada adalah dia menceritakan tentang bagaimana dia sudah mulai berubah, curhat dia mulai berubah. Dulunya dia menjadi preman, kemudian pelaku narkotik dan lain-lain. Kemudian bercerita bagaimana dia memiliki jaringan dan seterusnya-dan seterusnya sampai dia kemudian mulai berubah setelah ada di dalam Lapas. Dia mulai bertobat dan lain-lain dan dia bercerita juga diantaranya bahwa didalam Lapas pun dia bisa, dia tahu bahwa ada kegiatan pembuatan narkotik dan dia menyebut ada 2 nama. Itu ada 2 nama Anggota Polri, yang satu berpangkat Pati, yang satunya berpangkat Pamen, yang menurut dia 2 orang ini tahu tentang kegiatan dia. Nah tahunya ini tidak jelas. Tahunya ini apakah tahu kemudian mendapatkan setoran atau tahu karena ditangkap, lain-lain. Yang jelas 2 orang ini sudah diperiksa dan kedua orang ini justru yang menangkap yang bersangkutan. Bukan 2 orang saja tapi dalam tim besar. Ini menangkap yang bersangkutan 3 kali. 2 kali di Cipinang,

dan 1 kali di Nusa Kambangan setelah yang bersangkutan di vonis mati. Jadi yang disebut namanya tadi 2 kali tahu. Dia tahu mungkin, kami berpendapat karena yang berdua ini tahu dari orang lain melalui penyelidikan dan setelah itu ditangkap. Kemudian ada 1 lagi yang disebut namanya bukan hubungannya dengan masalah jaringan narkoba, bukan masalah uang tapi mengenai masalah kebijakan untuk membuat Lapas ada buayanya. Dia menyampaikan daripada Lapas itu ada buayanya, lebih baik cukup Lapas di Nusa Kambangan ini tapi diperketat. Kira-kira begitu. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah aliran dana, aliran uang. Ini yang ingin kami klarifikasi mengenai Freddy Budiman. Hingga saat ini kita belum melihat ada masalah aliran dana 90 Miliar itu yang katanya kepada Pejabat Polri belum ada, kami temukan baik dari video Freddy Budiman sendiri, dari berbagai pihak, Pleidoy lain-lain belum ada. Namun kita tetap melakukan langkah nanti kedepan. Tim masih berjalan karena ini tim diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan ini, mempelajari ini dan selanjutnya memberikan kesimpulan dan rekomendasi nantinya kepada Kapolri tentang langkah apa yang harus dilakukan. Dan tentu kami akan sampaikan secara terbuka kepada public. Mengirim surat ke kontras untuk minta laporan pengaduan tentang perilaku Anggota Polri yang lain terutama yang berhubungan dengan penanganan kasus Freddy Budiman. Kalau masih ada informasi lain dari Kontras atau darimana pun juga kita sangat terbuka. Terutama yang berhubungan dengan tadi, apakah memberikan suap kepada petugas. Berkoordinasi dengan keluarga Freddy Budiman terkait video dan dengan PPATK untuk mencari informasi transaksi mencurigakan jaringan Freddy Budiman termasuk dengan BNN. Karena ada informasi bahwa keluarganya juga memiliki rekaman video. Nah ini kita juga sedang berkoordinasi, apa mungkin ada video tersebut bisa kita peroleh kalau memang betul-betul ada.

Kemudian melakukan pemeriksaan ulang atas informasi khususnya yang didapat oleh tim dan hasil analisa terhadap aliran dana terkait TPPU yang sedang ditangani Bareskrim. Bareskrim saat ini sedang menangani kasus TPPU, apakah mungkin aliran dana Freddy Budiman ke pihak-pihak lain atau kemudian digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain untuk pencucian. Ini kira-kira mengenai langkah-langkah yang kita lakukan perkembangannya dengan Freddy Budiman. Prinsip nanti setelah tim selesai memberikan kesimpulan nanti akan disampaikan kepada kami dan kami menyampaikannya kepada public.

Kemudian SP3 terhadap kasus kebakaran hutan di Riau. Kasus kahutla (kebakaran hutan lahan) yang ditangani oleh Bareskrim ada 2 kasus. Ini juga dihentikan. Jadi bukan hanya yang di Riau sebetulnya. Ada beberapa yang dihentikan. Cukup banyak juga yang diproses hukum sebetulnya. Lebih dari 200 ada berkas yang sudah kami selesaikan kepada Pimpinan, lebih dari 200 kasus Tahun 2015 kebakaran hutan-lahan dan hampir sebagian besar sudah diproses hukum, sebagian besar sudah P21 dan diajukan, sebagian dalam penyidikan, dan sebagian dihentikan. Nah yang dihentikan di Bareskrim sini ada 2. Alasannya api berasal dari area konsesi perusahaan, dari luar masuk kedalam konsesi perusahaan. Kemudian pelaku pembakar lahan adalah masyarakat, bukan korporasi dan sudah mendapat vonis dari Mahkamah Agung berupa pidana 3 tahun. Jadi terbukti bahwa pembakarnya bukan dari korporasi tapi dari masyarakat diluar lahan.

Kemudian di Riau sendiri. Nanti ada Pak Kapolda Riau, kalau nanti akan ada pendalaman. Ada 15 kasus yang dihentikan. Mulai bulan Januari sampai dengan bulan

Mei Tahun 2016. Jadi sekali lagi kami klarifikasi bukan dihentikan secara serempak apalagi baru-baru ini tapi itu dihentikan, dibahas, dihentikan mulai bulan Januari. Ada lagi yang dibahas, dihentikan lagi ada di bulan Februari. Sampai yang terakhir di bulan Mei 2016 sebanyak 15 kasus. Diantaranya alasannya lahan yang terbakar diluar peta kerja perusahaan dan dikuasai oleh masyarakat. Jadi lahan ini didalam lingkungan perusahaan tapi masih banyak masyarakat-masyarakat yang tinggal ditempat itu dalam peta konsesi itu. Nah yang terbakar ini adalah diluar peta kerja yang belum dikerjakan oleh perusahaan tapi disitu ada masyarakat-masyarakat yang ada didalam, yang belum dibebaskan. Nah kebakaran ini terjadi dalam daerah yang dikuasai oleh masyarakat tadi.

Perusahaan telah melaksanakan kewajiban sesuai dengan Amdal. Berdasarkan keterangan ahli kebakaran bukan perbuatan maupun kelalaian perusahaan. Kemudian ijin pengelolaan lahan minta dibatalkan oleh Pemerintah. Jadi terbakar di suatu areal. Areal ini dulunya milik perusahaan tapi ijinnya sudah dicabut oleh Pemerintah. Otomatis korporasi tersebut bukan menjadi haknya lagi, dan kalau pun terbakar bukan menjadi bagian pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan.

Kasus kebakaran hutan di Sumsel, itu ada 1 kasus yang dihentikan. Api berasal dari kebun masyarakat yang berada disekitar area perusahaan. Jadi dari luar masuk kedalam. Keterangan ahli menyatakan unsur kelalaian tidak terpenuhi karena perusahaan telah memiliki sarana prasarana lengkap dan telah melakukan upaya pemadaman, pemadaman sendiri.

Kemudian di Kalimantan Tengah ada 2 yakni PT Global Indo, Alam Perkasa dan PT Persada Agro Kencana. Alasan penghentian titik api berasal dari luar HGU. Jadi ini rata-rata begitu, dari luar kemudian masuk kedalam 1 perusahaan.

Kemudian juga ada kasus kebakaran hutan juga di Kalimantan Barat ada 1, PT Rajawali Jaya Perkasa. Sama, lahan yang terbakar berada diluar wilayah ijin usaha perkebunan perusahaan. Bahkan di Riau ada yang terbakar itu diluar area konsesi masuk dan membakar kebun sawitnya sendiri yang sedang produktif. Nah ini memang tidak fare juga kita kalau melakukan pidana kepada perusahaan tersebut. Karena ini dengan terjadinya kebakaran tersebut justru malah rugi karena lahan tersebut sudah jadi, sudah produktif, malah terbakar dari kegiatan pembakaran oleh orang yang tidak dikenal diluar area masuk kedalam.

Kemudian progress terhadap kasus-kasus yang sedang dialami oleh Panja penegakkan hukum Komisi III DPR RI. Dulu ada pertanyaan dari Pimpinan juga yaitu mengenai kasus penipuan atas nama tersangka Iswati Sugianto yang ditangani oleh Polda Kalimantan Timur. Ini kasus ini dulu ditangani oleh Polda Kalimantan Timur, ditangani oleh Kabareskrim sekarang, Pak Kapoldanya juga ada, Pak Kabareskrim juga ada. Yang intinya adalah penipuan, penggelapan dengan pelapor Iskandar Harjo, terlapor Iswati Sugianto dengan modus operandi tersangka selaku x Direkur PT Induk Karya Gema Sakit telah menjual dan menyerahkan seluruh asset dan saham kepada pihak ke-3. Ini dianggap kasusnya penipuan sekaligus penggelapan asset dan saham tersebut. Penyidikan telah dilakukan ada saksi, 8 saksi ahli tersangka dokumen. Kasusnya sebenarnya sudah P21. Sudah P21 tanggal 23 April dan kemudian ditarik juga oleh Bareskrim saat itu Tahun 2016 sudah persoalannya adalah tersangkanya tidak ada alias DPO sehingga tidak bisa diserahkan tahap ke-2 kepada Kejaksaan dan informasi telah berada diluar negeri, sudah juga diterbitkan *red notes* melalui Interpol dan permohonan untuk pencabutan paspor yang bersangkutan. Jadi saat ini sedang

dilakukan pengejaran terhadap tersangka terhadap Iswati Sugianto dan sekaligus kita meminta bantuan dari komunitas Interpol agar kalau ada ada yang bersangkutan Anggota Interpol akan melakukan penangkapan. Sekaligus juga pencabutan paspornya.

Kasus lain yang menjadi pertanyaan dari Komisi III adalah kasus pasar Turi. Kasus pasar Turi yang semula sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur, kemudian ditarik ke Mabes Polri, kemudian dianggap di Mabes Polri terkesan lamban. Itu ditarik per Tahun 2015 akhir. Kasus ini adalah kasus penipuan penggelapan dengan palapor Abdul Habir dan terlapornya adalah Hendri Joko Sidiq Gunawan, Wakil Direktur PT Galabumi Perkasa. Tersangka menjual ini dulu kebakaran dari pasar turi kemudian Pemda Kota kemudian membuka investor untuk datang mengelola dan melakukan dengan skema BOT (Bill Operation and Transfer) yang kemudian dimenangkan oleh Direktur PT. Kami ulangi PT Gala Bumi Perkasa. Dalam perjanjiannya PT Gala Bumi Perkasa ini wajib untuk membangun dan kemudian nanti akan melakukan operasional dan sekaligus transfer dalam jangka waktu tertentu. Namun pada saat belum pembangunan PT Gala Bumi Perkasa ini kemudian menjual beberapa stand di pasar turi dan menjanjikan bukti kepemilikan, sertifikasi hak milik, dan lain-lain. Yang kemudian dianggap ini belum dilaksanakan atau dianggap oleh one prestasi. Sehingga dilakukan pemeriksaan, saksi ahli dan tersangka, berkas juga diajukan 21 Maret 2016. Namun dikembalikan lagi ke kejaksaan P19 karena masih ada, belum ada keyakinan bukti yang cukup bahwa kasus tersebut merupakan kasus pidana. Ini lebih banyak berkaitan dengan masalah hubungan perikatan, perjanjian sehingga perlu dicari bukti-bukti yang lain untuk menyakinkan bahwa itu kasusnya betul-betul kasus pidana penipuan. Bukan kasus perikatan one prestasi karena perjanjian yang mengarah kepada perdata. Ini yang sedang dikerjakan oleh Kabareskrim. Bapak Kabareskrim juga ada disini. Kasus lain yang menjadi pertanyaan adalah mengenai peredaran narkoba, perdagangan orang, pelanggaran HAM, dan tindak pidana lain yang menjadi perhatian masyarakat. Untuk kasus peredaran narkoba cukup banyak dalam semester 1 yang kita ungkap. Totalnya sebanyak 26.477 kasus, tersangka sebanyak 33.373 orang, barang bukti shabu hampir 700 kg, ekstasi hampir 500.000, heroin 152 gram, kokain 56 gram, ganja 5 ton lebih dan lebih dari 1,3 juta batang pohon ganja terutama di Aceh.

Ada beberapa yang menonjol, mulai penangkapan 9 tersangka di daerah Cirebon, kemudian lading ganja di Provinsi Aceh 212 hektar, penangkapan 2 tersangka 61 kg shabu, kemudian ada juga warga negara Taiwan tanggal 17 Agustus yang lalu 6 kg shabu, kemudian penangkapan terhadap tersangka public figure atas nama Gatot Brajamusti 28 Agustus dengan barang bukti 2 paket Kristal 1,62 sekaligus juga masih terus berkembang termasuk diantaranya dugaan kepemilikan ilegal senjata api sebanyak 2 buah dan amunisi. Ratusan amunisi pada yang bersangkutan.

Kemudian ada beberapa kasus yang menonjol diantaranya kasus di Meranti Riau. Yang diawali dengan meninggalnya Anggota Polisi dengan ditusuk dengan tersangka dan bernama Apriadi karena masalah perempuan dan kemudian Apri ini ditangkap oleh polisi namun dalam perjalanan, dalam penanganan polisi yang bersangkutan meninggal dunia yang berakibat masyarakat yang ada disana melakukan protes dan anarkis melempari Polres dengan batu. Kasus ini sudah kondusif situasinya di Meranti. Kemudian yang kita lakukan adalah melakukan pendalaman terhadap Anggota polisi yang menyebabkan kematian dari tersangka pelaku penusukan terhadap Anggota Polri yang meninggal dunia juga dan sudah ada 3 orang tersangka dari Anggota Polri yang sudah

kita tahan dan saya sudah instruksikan, lakukan proses bukan hanya kode etik tapi proses pidana untuk diajukan ke peradilan umum. Kemudian terhadap kapolresnya pun saat itu juga kita langsung lakukan langkah dengan penggantian Pimpinan yang baru.

Kemudian kasus pembakaran di Polsek di Jambi, di Polsek Tabir, Jambi, Merangin. Ini bermula dari penangkapan 7 orang pelaku penembakan tanpa ijin, jual beli emas dari hasil peti, penambangan tanpa ijin, kemudian terjadi informasi di masyarakat yang kemudian mereka membela pelaku penembakan tersebut dan terjadi mobilisasi masyarakat menyerang polsek dan kemudian membakar Polsek. Terhadap peristiwa ini sudah dilakukan langkah-langkah oleh Kapolda dan jajaran, kemudian dilakukan komunikasi. Prinsipnya sejumlah pelaku sudah dilakukan penangkapan. Ada 4 tersangka yang melakukan pembakaran dan provokasi. Namun kami juga sudah menyampaikan kepada Kapolda bahwa untuk penangkapan terhadap kasus-kasus terutama yang menyangkut masalah peti, yang menyangkut ekonomi masyarakat lain-lain. Jangan hanya bersandar kepada legitimasi hukum tapi juga sosialisasi dan pendekatan social kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan public sebelum melakukan tindakan-tindakan.

Kemudian rekonstruksi bangunan sudah dilakukan bersama-sama, baik polisi dengan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat untuk memperbaiki kembali Polsek yang terbakar.

Kemudian kasus pembakaran Polsek Sugapa di Paniai. Saya ulangi Intan Jaya. Kabupaten Intan Jaya di Papua, tanggal 27 Agustus yang lalu. Bermula dari adanya masyarakat, sekelompok pemuda yang dalam keadaan mabuk menghalangi jalan sehingga akibatnya masyarakat melapor kepada polisi karena mereka tidak bisa menggunakan akses jalan itu dan kemudian sekelompok polisi dari Brimob datang ke lokasi dan kelompok pemuda ini rupanya ada yang membawa parang, dan lain-lain. Mereka menunjukkan tanda agresif sehingga terjadi penembakan yang mengakibatkan kematian 1 orang atas nama Otenus Sondegao dan akibat kematian ini masyarakat yang alias tempat disana marah, mobilisasi dan kemudian melakukan pembakaran ke polsek ini. Saat ini situasi sudah terkendali. Wakapolda cepat datang ke lokasi bersama Kapolres dan bersama Bupati. Kemudian situasi sudah terkendali, pemakaman sudah dilaksanakan, kemudian diberikan juga uang duka. Dan kemudian terhadap anggota ini sudah dilakukan pemeriksaan di Polda Papua karena Anggota Polda Papua diperiksa. Dan nanti kalau memang ada kesalahan dalam SOP kita akan melakukan tindakan tegas kepada Anggota sekaligus juga untuk makin mendekatkan hubungan antara Polisi setempat dengan masyarakat.

Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan melihat dari fenomena ada setidaknya 4 kantor polisi yang diserang oleh public, oleh masyarakat ini. Kami sudah menginstruksikan semua jajaran untuk membangun komunikasi yang sebaik-baiknya. Lebih mendekat lagi kepada masyarakat. Setiap akan melakukan tindakan hukum terutama yang cukup sensitive berdampak ke masyarakat agar dilakukan langkah-langkah pendekatan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan social.

Kemudian untuk kasus terror bom di gereja Katolik Medan tanggal 28 Agustus yang lalu. Pelaku atas nama Ivan Armadi Hasugian. Saya kira sudah paham bahwa intinya adalah membawa bom yang ditaruh dalam ransel yang diledakan tapi tidak meledak sempurna sehingga hanya keluar api dan kemudian dia menggunakan senjata tajam yang sudah dibawa menyerang Pastur dan terkena bagian tangan namun berhasil

dilumpuhkan oleh jemaat saat itu. Terhadap peristiwa ini kita sudah melakukan pengembangan. Dia adalah tipologi self radikalitation. Jadi radikalisasi sendiri. Belum tergabung dalam jaringan atau network apa pun yang ada di Indonesia. Namun dia memiliki kontak langsung dengan Barum Naim yang ada di Raka, Syria. Barum Naim ini juga tokoh Indonesia yang tinggal di Syria bergabung ISIS yang terkait juga dengan beberapa peristiwa termasuk bom di Mapolresta Solo, percobaan bom yang ada di Surabaya dan percobaan rencana aksi terror akhir Tahun 2015 di Jakarta. Ini memiliki hubungan kontak langsung. Tersangka Ivan yang baru berumur 17 tahun ini kepada Saudara Barum Naim. Sehingga kami melihat bahwa ini adalah fenomena baru. *Loan ...* dengan merekrut anak-anak dibawah 18 tahun dan kemudian membuat bom sendiri, merakit sendiri, melakukan operasi sendiri. Ini yang disebut dengan fenomena *loan wolf* yang sedang berkembang.

Kemudian kasus lain adalah penipuan calon Jemaah haji Indonesia di Philipina. Ada 177 orang calon Jemaah haji yang ditangkap oleh imigrasi Philipina di Manila, bandara Minoi Akiuno. Yang memberangkatkan kan ada 5 travel jasa Indonesia. Mereka calon Jemaah haji ini menggunakan paspor Philipina sehingga akhirnya mereka ditangkap. Dalam kasus ini kita sudah mengirim tim semenjak hari ke-2, kami dihubungi oleh Menteri Luar Negeri Ibu Retno, dan langsung tim kita kirim berangkat kesana. Pemulangannya akan di koordinir oleh Ibu Retno Menteri dan Duta Besar Bapak Joni Lumintang di Manila melalui upaya-upaya diplomasi. Sedangkan Polri diminta untuk melakukan investigasi terhadap khususnya yang memberangkatkan kemungkinan pidana. Dan kami sudah melakukan pemeriksaan, membentuk tim yang berangkat ke Kalimantan Timur kemudian ke Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lain yang terkait dengan kasus ini dan tim-tim ini sudah bergerak semua termasuk ke Manila, melakukan interview kepada saksi-saksi yang ada disana termasuk coordinator yang memberangkatkan sudah kita periksa dan hingga saat ini tim sudah kembali, sedang melakukan koordinasi dan Jaksa. Kita mungkin akan menerapkan kasus penipuan kepada beberapa orang khususnya 5 orang yang mengelola jasa travel ini dan kemungkinan besar nanti akan kita tetapkan sejumlah tersangka dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kasus pornografi perdagangan orang di Kabupatne Bogor hari Selasa 9 Agustus. Ini bermula dari penyelidikan online. Kita yang sebut dengan internet patrol oleh tim dari Bareskrim Polri. Adanya konten pornografi yang menawarkan anak laki-laki dibawah umur dengan tariff shortime sekali main 1,2 juta untuk umur dibawah 16 tahun. Kemudian dilakukan penangkapan 3 orang oleh tim dari Bareskrim dan kemudian masih berkembang berlanjut karena ada 6 orang lainnya yang sedang kita cari dan kita kejar. Sejumlah korban cukup banyak, saya kira lebih dari 90-an yang sudah kita daftarkan. Dan kita bekerjasama dengan KPAI untuk melakukan *traumatic helling* kepada korban-korban ini sekaligus juga kita tidak berusaha meng-ekspose korban-korban ini karena mereka anak-anak. Namun kepada tersangkanya kita tetap melakukan upaya penyidikan dan pengembangan sekaligus pengejaran kepada anggota-anggota, pada yang 6 orang lainnya. Sambil kita berusaha mengembangkan kemungkinan diluar 6 tersangka lain masih ada kelompok yang lain.

Kemudian kasus perdagangan orang. Kasus perdagangan orang ini, ada sejumlah kasus yang kita tangani di Tanjung Balai ada 16 tersangka yang kita tangkap dan ada 17 orang yang akan diberangkatkan ke luar, rata-rata dari NTT. Ini memang pada waktu *fit*

and proper test waktu itu kami sudah ditanya oleh Pak Benny Karman maupun Pak Herman Heri, ini agar menjadi atensi sehingga kita memang sudah membentuk tim. Dan kemudian Bapak Presiden juga datang ke Kupang juga suara yang sama dari masyarakat. Tim dari Bareskrim yang sudah dibentuk bergerak dan sudah ditangkap, total sebanyak 25 orang hingga saat ini. Kemudian sejumlah saksi-saksi yang akan diberangkatkan juga lebih dari 40-an orang juga sudah kita selamatkan. Dan kelompok ini memang cukup terorganisir rapih karena mereka ada jaringan yang ada di NTT, jaringan yang ada di Surabaya, di Semarang yang ditangkap, kemudian ada juga yang di Dumai, di Tanjung Balai, sampai di luar negeri. Nah ini jaringan ini sebageian besar termasuk tokoh utamanya sudah ditangkap di Semarang beberapa waktu yang lalu. Kami terus mengembangkan kasus ini dan setelah kasus ini memang ada pengembangan ini. Polda pun melakukan langkah-langkah sehingga Kapolda melakukan penangkapan-penangkapan juga terhadap sisa jaringan yang ada di NTT.

Kasus pembakaran di Wihara di Tanjung Balai. Ini memang bermula dari masalah tetangga. Kebetulan satunya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang satunya lagi takmir Masjid sebelahnya akibat suara adzan dan lain-lain. Permasalahan sebetulnya ini ditangani oleh warga local, ketua lingkungan, Polsek tapi tiba-tiba berkembang di media social bahwa ada orang Tionghoa yang melarang adzan. Sehingga viral cepat sekali dan kemudian terjadi pembakaran wihara, bahkan yang tidak ada hubungan juga Klenteng, ini juga ada yang dibakar. Polda karena memang jarak cukup jauh saat itu agak sedikit terlambat sehingga akhirnya 6 jam dari Medan, Brimob dikirim. Situasi bisa diatasi dan kemudian memang terjadi kerusakan tapi tidak ada korban yang meninggal dunia maupun yang luka. Jadi kerusakan kebakaran dan tim dari Polda, Mabes juga turun kesana dan kekuatannya. Situasi dapat dikendalikan dengan baik. Kemudian kita lakukan langkah-langkah pemulihan mulai dari rekonsiliasi antara pihak-pihak masyarakat local yang ada disana dengan masyarakat warga Tionghoa, kita melokalisir jangan sampai berkembang dari Tanjung Balai. Dan yang ketiga adalah melakukan rekonstruksi yang terbakar. Sehingga saat ini proses rekontruksi sudah berjalan dan kita bersyukur bahwa permasalahan tidak berkembang ke tempat lain dapat di lokalisir.

Kasus lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah peristiwa yang ada di Makasar yaitu antara oknum Satpol PP dengan oknum Sabara dari Polda Sulawesi Selatan. Bermula dari naik kendaraan, suaranya keras Anggota Polisi ini di Pantai Losari, kemudian oknum anggota Satpol PP menegur terjadi cek cok mulut kemudian perkelahian, anggota polisinya terluka, pulang dan disitu memang ada asrama yang tidak jauh dari Balai Kota. Di asrama itu kemudian banyak anak-anak anggota polisi yang masih muda disana, cepat terbawa emosi, kemudian mereka mencari anggota Satpol PP sehingga terjadi tawuran dan 1 anggota polisi meninggal dunia, dari Satpol PP juga ada yang terluka. Kasus ini cepat dilokalisir oleh Kapolda, Pangdam, Gubernur, Walikota dan kemudian sudah dapat dinetralisir dengan baik. Proses hukumnya anggota yang melakukan penusukan terhadap Anggota Polisi sehingga meninggal dunia ini sudah dapat diangkat dan dilakukan proses hukum sambil dilakukan kegiatan-kegiatan rekonsiliasi lebih lanjut. Kami sendiri sudah datang kesana, bertemu dengan Pimpinan-pimpinan daerah disana untuk melakukan mempermulus langkah-langkah rekonsiliasi. Kasus juga yang menarik adalah kasus pembunuhan anggota Polri yang ada di Bali, anggota Polri yang sedang melakukan patroli disana, kemudian ada 1 pasang, 1 warga asing dari Australia yang perempuan, kemudian warga negara Inggris yang laki-laki

mereka sedang berpacaran malam hari dan kemudian menurut informasi dari perempuan tasnya hilang. Sambil mencari tas dia bertemu dengan sang anggota polisi yang sedang berpakaian, menggunakan jas, jaket dan kemudian terjadi pertengkaran mulut, perkelahian karena dipukul. Kemudian ini anggota di pukul dengan botol kepalanya termasuk kemudian ada pecahan botol itu ditancapkan ke kepalanya sehingga meninggal dunia. Ada sejumlah barang bukti yang sudah disita di penginapan yang bersangkutan. Penginapan para tersangka. Ditemukan bercak-bercak darah dan hasil pemeriksaan darah ini identic dengan darah korban. Disamping itu juga ditemukan kuku jari di gigi daripada tersangka. Tersangka yang laki-laki dan kuku ini adalah identic dengan kuku dari korban. Sehingga kedua orang ini dilakukan penahanan, sekarang dalam proses penyidikan.

Kemudian mengenai realisasi program prioritas sebagaimana kami sampaikan bahwa visi misi, ada 11 program prioritas yang kami sebut dengan Intinya adalah kita ingin meningkatkan kepercayaan public terhadap Polri dengan mewujudkan polisi yang lebih professional, dan lebih modern. Itu yang disebut dengan promoter. Untuk menuju professional dan modern ini ada 11 program prioritas, mulai dari reformasi internal, peningkatan layanan public, penanganan kelompok radikal pro kekerasan, profesionalisme menuju keunggulan, peningkatan kesejahteraan anggota, penataan lembaga, penguatan harkamtibmas, membangun kesadaran partisipasi masyarakat, penegakan hukum yang lebih professional, penguatan pengawasan dan melanjutkan quick win spory. Program promoter ini dibagi menjadi 3 tahapan, 100 hari, kemudian tahap ke-2 November sampai dengan Desember 2019. Yang terakhir adalah Januari 2020 sampai dengan Desember 2021. Saat ini kita masih memasuki tahap 100 hari. Dari tahap evaluasi 100 hari ini dari tanggal 25 Juli sampai 25 Agustus ini baru 2 bulan dari rencana 3 bulan. Rata-rata proses capaian kegiatan sebanyak 30,79%. Jadi mulai program 1 sampai dengan program No. 10 itu mencapai berkisar antara 27 sampai dengan 38 persen.

Kemudian ada beberapa hal yang rill yang sudah kita laksanakan, sosialisasi commander wish secara berjenjang kebawah. Layanan public yang berbasis teknologi seperti SKCK online, sudah jalan. Ada SKCK keliling online, ada pelayanan terintegrasi berbasis IT, kemudian kantong online berbasis android, *phanic betton* di beberapa tempat, system operasional terpadu, kemudian alarm system dan sejumlah program-program lainnya yang berbasis IT. Kemudian ada juga Lapan Standar pendidikan Polri yang sudah kita susun. Santoso juga yang sudah menjadi salah satu program *quick win* itu sudah berhasil kita netralisir. Artinya sudah tewas tertembak dalam penyerangan di Poso itu juga menjadi target yang utama, pembentukan Polda Sulbar, kemudian pembentukan Tipologi Polda Sulawesi Utara dan Kalimantan Barat yang sudah kita resmikan, serta pengusulan beberapa Polda baru Kaltara dan sekaligus peningkatan Polda Lampung, Riau dan Kepulauan Riau.

Kemudian penguatan kerjasama dengan beberapa stakeholder, cukup banyak kita lakukan dengan telekomunikasi, Nahdatul Ulama, dan sejumlah pihak lainnya.

Kemudian kita juga melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Polri. Saat ini sedang disusun per kap tentang laporan LHKPN, kepemilikan barang mewah, pemilikan gratifikasi, dan usaha bisnis sebagai pegawai negeri pada Polri, aplikasi wishel blower system, kemudian edaran Kapolri tentang pola hidup sederhana, kemudian juga Pak Edwasum juga sedang melakukan pengawasan internal, Wasrik. Ada

beberapa wasrik khusus yang dilakukan oleh Pak Irwasum, mulai dana hibah di Provinsi DKI yang melibatkan sudah cukup lama ini masalah tanah yang ada di Lemdikpol yang akan digunakan untuk MRT di ganti atau ditukar guling dengan tanah yang ada di Lembang untuk sekolah, pendidikan yang ada disana. Kemudian peremajaan video *conference*, pembangunan Makupolres di Balikpapan yang juga menjadi temuan, kemudian pertanggungjawaban khusus untuk Tahun Anggaran 2013-2015 di Kalimantan Timur. Ini juga sedang menjadi objek pemeriksaan khusus dari jajaran Pak Irwasum.

Kemudian Komisi III juga minta penjelasan tentang tindak lanjut atas kesimpulan Rapat Kerja tanggal 20 April termasuk penanganan tindak pidana terorisme, narkotik dan lain-lain. Secara umum penanganan terorisme kita menggunakan pendekatan *soft approach* dan *hard approach*. *Hard approach* tetap dengan penegakan hukum, dan *soft approach* kita lakukan dengan kegiatan kontra radikalisasi, kemudian de-radikalisasi, rehabilitasi, kontra ideology dan lain-lain. Kemudian khusus untuk *hard approach*, prinsipnya kita menerapkan sesuai dengan *due process of law*, artinya membawa semua pelaku ke peradilan. Namun dalam praktek memang pada saat penangkapan sejumlah tersangka tidak melakukan perlawanan sehingga terpaksa kita lumpukan karena mereka menggunakan senjata yang mematikan, penembakan terhadap anggota mau tidak mau kita juga melakukan pembelaan diri, dalam keadaan terpaksa juga dapat melakukan penembakan dan berakibat tersangka meninggal dunia karena melakukan perlawanan.

Untuk masalah penanganan narkoba, kita juga melakukan yang lebih insentif bekerjasama dengan semua pihak termasuk BNN untuk menekan demand dan supply. Demand ini kita lakukan diantaranya dengan melakukan kampanye-kampanye tentang pencegahan, kemudian kita juga melakukan penegakan hukum, pemberantasan narkoba ini baik dengan kelompok-kelompok besarnya maupun juga terhadap kampung-kampung narkoba. Ini kita lakukan.

Kemudian rehabilitasi kita juga lakukan karena ini memang amanat Undang-Undang, dibentuk tim assessment terpadu, ada ahli hukum, dokter, psikolog, lain-lain dengan mengoptimalkan semua rumah sakit bhayangkara menjadi institusi penerima wajib lapor, rehabilitasi. Juga kita lakukan kerjasama nasional, maupun internasional didalam negeri dengan semua pihak termasuk masyarakat dan Pemerintah dan kerjasama internasional dengan *counter part* kita, kepolisian di Asia Tenggara maupun di luar itu.

Selanjutnya untuk system seleksi anggota Polri di semua jenjang. Kita sudah melakukan evaluasi, kaji ulang, kemudian kita juga melandaskan kepada kuota ini berdasarkan kepada kebutuhan organisasi dan ketersediaan ruang jabatan. Kita menerapkan juga asas reward and punishment, dan pemerataan perwakilan Satker. Ada sejumlah langkah-langkah yang kita lakukan dalam rangka system seleksi secara terpadu. Mulai dari prinsip efisien yaitu 1 kali seleksi sehingga menghemat waktu dan biaya, contohnya Lemhanas dan ... kita laksanakan sekali agar biaya menjadi lebih murah.

Kemudian prinsip efektif, peserta seleksi 1 kali mengikuti seleksi ujian. Memberi kesempatan yang sama bagi peserta seleksi, transparan. Saya kira sekarang recruitment dan pendidikan ini di Polri sudah sangat jauh lebih terbuka dibanding dulu. Ada item-item yang di outsourcing oleh pihak lain seperti misalnya tes Toefl Bahasa Inggris untuk Lemhanas untuk ..., kemudian tes TPA. Ini semua melibatkan pihak eksternal. Dari Bappenas dan dari lembaga-lembaga Bahasa Inggris yang kredible secara internasional

sehingga tidak bisa kita intervensi. Demikian juga system computer *assessment test*. Ini begitu di test psikologi, tes akademik itu langsung keluar nilainya, tidak bisa kita intervensi.

Kemudian pembinaan karier yang lebih transparan kita pada prinsipnya pembinaan karir ini akan lebih baik dengan mengandalkan pada beberapa prinsip. Mulai melaksanakan analisis jabatan, evaluasi jabatan, peta jabatan, kompetisi jabatan, kemudian pola jalur karir, dan menerapkan prinsip-prinsip *married system* serta *open* Ada beberapa nanti yang akan kita jabatan penting yang akan kita *open beading*-kan sehingga semua anggota Polri yang memenuhi syarat nantinya boleh ikut dalam *open beading* jabatan-jabatan yang kita umumkan dan setelah itu dibuat tim. Yang terbaik nanti akan dipilih berdasarkan hasil *open beading* tersebut.

Kemudian penanganan pengaduan masyarakat ada 47 surat pengaduan masyarakat pada saat disampaikan pada Komisi III yang sudah disampaikan kepada kami. Tindak lanjutnya 4 surat tidak berkadar pengawasan. Artinya 4 surat itu isinya biasa saja, tidak harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Lebih merupakan usulan-usulan. 43 surat pengaduan ditindaklanjuti statusnya, 4 pengaduan benar dan sudah diselesaikan. Jadi laporan tersebut benar dan sudah ditindaklanjuti oleh tim Bapak Irwasum. 21 pengaduan selesai karena tidak benar, artinya tidak terbukti kebenarannya. Dan 18 pengaduan masih dalam proses Bapak Irwasum.

Berkaitan dengan anggaran. Sesuai dengan tahun anggaran 2016 Polri memperoleh anggaran sebanyak 73 Triliun lebih. Belanja pegawai 37 Triliun lebih atau 50,83%, belanja barang 19 Triliun lebih hampir 20 Triliun atau 27,13% dan belanja modal sebanyak 16,4 Triliun atau 2,31%. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Realisasi sudah terjadi sebanyak 33,7 Triliun atau 45,77 Triliun. Masih ada sisa anggaran sebanyak 39,9 Triliun atau 54,23%. Uraian realisasinya, dari program Polri. Untuk dukungan manajerial dan pelaksanaan tugas teknis, realisasi sebanyak 59% dan sisa sebanyak 40%. Peningkatan sarana-prasarana aparatur yang sudah ter-realisasi sebanyak 25,97% masih sisa 74%. Program pengawasan akuntabilitas aparatur negara terserap 65%, sisa 34%. Penelitian pengembangan 51%, sisa 48%. Program pendidikan latihan 56,55%, sisanya 43%. Program pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) 58,31, sisa 41%. Pengembangan strategi keamanan dan ketertiban terserap 52%, sisa 47%. Program kerjasama Kamtibmas terserap 26%, sisa 73%. Pemberdayaan potensi keamanan terserap 45%, sisa 54%. Program pemeliharaan Kamtibmas sebesar 35% terserap, sisa masih 64%. Lidik sidik pidana terserap 55%, sisa 44%. Penanggulangan Kamtibmas berkadar tinggi terserap 74%, sisanya 25%. Program pembangunan hukum kepolisian terserap 51%, kemudian sisa 48%. Di tahun ini kita menghadapi sejumlah penghematan karena memang terjadi disemua K/L. Sesuai dengan Inpres Nomor 8 Tahun 2016, penghematan anggaran Polri sebesar 2,959 Triliun. Ini kita laksanakan pada jenis belanja barang Rupiah murni RM sebesar 42,62%. Dari sisa alokasi alokasi anggaran yang belum digunakan sebesar 5,2 Triliun serta dari pengadaan barang dan jasa pada belanja modal Rupiah Murni dari tambahan APBNP 2016. Penghematan anggaran tersebut secara umum akan mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Polri Tahun 2016. Namun tidak mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Jadi program prioritas yang sudah kami canangkan tetap diberikan alokasi secara prioritas juga. Kinerja memang akan menurun sedikit tetapi program prioritas yang menjadi *quick win* kita itu tetap dapat terjaga.

Sehingga secara umum kinerjanya kita harapkan tidak akan banyak berubah. Dampak penghematan anggaran, berkurangnya dukungan anggaran kegiatan operasional perkantoran karena sebagian besar diambil dari belanja barang. Tapi masih cukup banyak sisa belanja barang yang masih bisa kita gunakan.

Berkurangnya dukungan anggaran kegiatan tour rajawali, deteksi dan penyuluhan Bimas. Namun tetap mempertimbangkan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak. Ini Pilkada serentak sudah mulai memasuki tahapan. Tetap kita anggaran-anggaran yang digunakan dalam rangka tahapan Pilkada ini tidak terganggu. Yang terganggu adalah kegiatan-kegiatan rutin kepolisian. Berkurangnya dukungan anggaran kegiatan fungsi pendukung. Jadi fungsi utama kepolisian, Reserse, Sabara, Binmas, Intelijen, lain-lain tetap terjaga. Namun kegiatan fungsi-fungsi pendukung seperti fungsi Brimob tangti taktis, fungsi-fungsi lain kepolisian air dan lain-lain itu. Itu akan dikurangi. Berkurangnya volume pengadaan peralatan dengan tetap mempertahankan penyediaan jenis, peralatan mendesak dan prioritas. Jadi pengadaan untuk belanja modal juga ada pengurangan tapi yang prioritas tetap dipertahankan. Kemudian ada sejumlah temuan BPK terkait kelebihan pembayaran belanja modal 89 ada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK Tahun 2015 ini diantaranya mengenai masalah kekurangan volume, belanja modal sebanyak Rp89.000.000,- ini juga sudah kita selesaikan. Ada yang di Lemdikpol, ada yang Sarpras, kemudian di TI, yang totalnya sebanyak 1,4 Miliar Rupiah. Sebagian besar sudah diselesaikan sebanyak 774 Miliar pengembalian ke kas negara dan sisanya dari Satker Lemdikpol dan Div TI sebanyak 710 Juta masih dalam proses.

Kemudian ada juga temuan BPK, kelebihan pembayaran. Barang tidak sesuai itu melebihi ketentuan sebesar 5,9 Miliar. Di beberapa Satker, mulai di Jateng, Riau, Jatim, kemudian di Gorontalo, ada beberapa kelebihan pembayaran. Ini sebagian sudah diselesaikan dan sebagian lagi memang masih sedang ada dalam proses.

Selanjutnya memang ada temuan BPK juga sebesar 812 Juta yang pembayarannya berlebihan untuk operasi kepolisian di Jawa Tengah, Riau dan Polda Jatim telah selesai dengan penyetoran 585 Juta sudah tuntas. Kemudian di Jawa Timur dan Gorontalo sebanyak 144 Juta. Semuanya juga sudah diselesaikan. Ditetorkan kembali. Kemudian kegiatan lidik, sidik di Polda Gorontalo sebanyak 77 Juta telah ditindaklanjuti dengan pengembalian sebanyak 28.821.000 dan sisanya masih 48 juta masih sedang kita klarifikasi dan verifikasi. Kalau memang semuanya harus dibayarkan akan dibayarkan tapi ini dari 48 Juta ini sedang melakukan verifikasi karena dari Polda Gorontalo juga menyampaikan bahwa mereka memiliki data-data bahwa uang tersebut sudah terserap.

Kemudian pendistribusian BMP (Bensin, Minyak dan Pelumas) pada Polda Gorontalo sebanyak 3000 liter dan 5000 liter juga Pertamina telah selesai ditindaklanjuti. Saya kira Bapak-bapak dan Ibu sekalian, beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami, baik mengenai masalah kasus-kasus yang menonjol, kemudian 10 program prioritas dan 1 quick win jadi 11 total serta temuan beberapa kasus yang dilaporkan oleh Komisi III berikut sejumlah temuan BPK yang sudah kami tindaklanjuti kami laporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti dapat menjadi bahan dalam rangka diskusi kita. Sekian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kapolri.

Selanjutnya sebelum Bapak/Ibu Anggota, kami persilakan Pak Benny mempertanyakan surat Pimpinan DPR.

Silakan Pak Benny.

F-PD (DR. BENNY KABUR KARMAN, SH):

Baik.

Terima kasih Pimpinan.

**Pak Kapolri yang kami hormati,
Bapak/Ibu Anggota Komisi III,**

Mohon tanggapan pak Kapolri juga. Surat yang disampaikan oleh Pimpinan Dewan tanggal 9 Agustus 2016. Ini berkenaan dengan pelaksanaan penegakan hukum oleh Kapolda Kalimantan Timur berkaitan dengan sengketa. Kalau Kaltim ini kan pasti ada hubungannya dengan lahan-lahan tambang ini. Ini untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan kepada Komisi III dan ini adalah bentuk tanggung jawab. Ini penting Pak Kapolri sebab setiap kali ada Rapat Dengar Pendapat selalu ditutup dengan statement yang pedas. Komisi III ini jangan hanya nampung tugasnya. Tolong ditagih, apa pun jawabannya tidak masalah tetapi tolong ditindaklanjuti.

Kemudian yang kedua, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolri yang telah menindaklanjuti kasus *human trafficking* di NTT. ... atas nama rakyat NTT kami menyampaikan apresiasi dan dukungan yang setinggi-tingginya atas tindak lanjut laporan masyarakat.

Sekian dan terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Kapolri untuk ditanggapi.

KAPOLRI:

Baik.

Jadi mengenai kasus yang tadi disampaikan. Prinsipnya sudah ditangani dan sekaligus sudah di *back-up* dari Mabes Polri untuk kasus yang Induk Karya Gema Sakti tadi dan ... Jaya Agung. Yang tersangkanya masih DPO Pak ya. Tapi mungkin disini juga kami hadirkan Pak Kapolda Kalimantan Timur kalau mungkin akan memberikan tambahan penjelasan. Mungkin Pak Kapolda kami persilakan pak.

KETUA RAPAT:

Sebelum ke Pak Kapolda, Bapak sudah baca surat Bapak Dion.
Silakan Pak.

KAPOLDA JATIM:

Terima kasih Pak Kapolda Kaltim.

Kami sudah menjawab kepada Bapak Kapolri Pak tentang surat itu karena kami disampaikan dan kami sudah menjawab bahwa sebetulnya kasus itu Pak dilaporkan di Bareskrim dan ada surat disitu bahwa Polda Kalimantan Timur tidak professional dalam penegakan hukum. Kami laporkan Pak bahwa yang tangani sebenarnya Bareskrim Pak. Bukan Polda Kaltim. Kami menangani DPO yang diberikan oleh Bareskrim. Jadi pada waktu rombongan Bapak Komisi III ke Polda Kalimantan Timur memang kami berjanji untuk menangkap atas nama Iswati, itu tanggal 18 rombongan Komisi III kesana dan setelah kami cari tanggal 21 Januari itu sudah berangkat ke luar negeri atas nama Iswati Pak. Itu yang mungkin perlu kami jelaskan bahwa kasus itu ditindaklanjuti oleh Bareskrim karena memang DPO-nya adalah Bareskrim Pak. LP-nya Bareskrim, penanganannya juga oleh Bareskrim. Kami hanya menindaklanjuti DPO atas nama Iswati. Dan itu sudah kami laporkan langkah-langkah yang kami sudah ambil Pak.

Terima kasih.

KAPOLRI:

Mungkin dari Pak Kabareskrim mau menambahkan langkah-langkah kita untuk mencari yang bersangkutan DPO-nya.

KABARESKRIM:

Baik.

Terima kasih atas ijin Bapak Kapolri.

Bapak Pimpinan yang kami hormati,

Kami laporkan untuk kasus tersebut, itu sudah P21 berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa tapi untuk sementara tersangka itu tidak ada ditempat. Informasi berangkat ke luar negeri, Singapura untuk pencekalan. Sudah kami perpanjang juga. Kemudian untuk pencarian ini dalam proses untuk *red notes*-nya. Jadi rencana tindak lanjut mungkin sampai dengan pencabutan paspornya yang kita rencanakan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Bapak/Ibu sekalian,

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PDIP untuk bertanya.

F-PDIP (HERMAN HERRY):

Ini berapa orang boleh bicara per Fraksi?
Oke, saya sebagai Kapoksi akan bicara dulu.

Terima kasih Pimpinan Komisi III yang saya hormati.

**Anggota Komisi III yang saya banggakan,
Saudara Kapolri dan seluruh jajaran pejabat utama Polri yang hadir dan Anggota
yang lainnya,**

Pertama-tama saya ucapkan selamat buat Saudara Kapolri. Ini rapat yang pertama di era Kapolri baru. Tentunya Kapolri baru adalah harapan baru. Walaupun Saudara dari sisi angkatan dan usia masih muda namun hal utama yang saya pernah mendengar satu statement Saudara Kapolri bahwa saya adalah Kapolri semua angkatan. Saya hanya bisa bekerja kalau didukung oleh semua angkatan yang ada. Dan ini statement yang penuh dengan kerendahan hati.

Oleh sebab itu, pada hari ini kami melihat, saya melihat bahwa Saudara didampingi dengan beberapa senior hampir semua senior. Dan ini menggambarkan soliditas yang terjadi di tubuh Polri hari ini. Karena Kapolri baru tentu harapan pun banyak, baik dari masyarakat maupun dari kami yang ada di Komisi III. Didalam membangun harapan-harapan atas kinerja yang dilakukan oleh Saudara Kapolri dan jajarannya tentunya ada banyak hal yang akan kita bicarakan dalam masa-masa sekarang dan kedepan. Hari-hari ini yang selalu kita dengar dalam RDP ini kasus dan kasus dan kasus. Seyogyanya hubungan kita ini kan hubungan kemitraan. Kemitraan dengan Tupoksi masing-masing. Anda sebagai Pemerintah dengan tugas dan fungsinya. Kami sebagai DPR dengan tugas fungsi utama kami didalam RDP adalah fungsi control dan pengawasan kami terhadap kinerja yang Saudara lakukan. Saya sebagai Anggota Komisi III yang sudah cukup lama sudah mengalami RDP dengan 4 sampai 5 Kapolri, melakukan *fit and proper test* dengan kapolri-kapolri sebelumnya merasa bosan setiap kali RDP tentu pertanyaan-pertanyaan itu yang kita angkat adalah kasus. Kasus lagi, kasus lagi. Seolah-olah lembaga ini seolah pertanyaan antara pengacara ke polisi. Apa yang sudah kau bikin terhadap kasus ini. Sementara fungsi DPR sebetulnya lebih luas dari itu. Lebih luas dari soal kalau kasus saya kira untuk urusan yang sangat kecil asal Kapolri mau saja, asal Pimpinan Polri lainnya sepakat dengan apa yang dikatakan dalam 11 program ini, antara lain dikatakan peningkatan profesionalisme Polri menuju keunggulan, penegakan hukum yang lebih professional dan berkeadilan. Kasus-kasus ini tidak akan muncul pertanyaan di Komisi ini kalau polisi professional. Persoalannya adalah polisi masih banyak kali tidak professional dan lebih malang lagi semua perbuatan polisi-polisi-polisi-polisi, orang per orang, anggota per anggota, divisi per divisi Kapolrilah harus menjadi penanggungjawab utama. Harus menjawab semua pertanyaan di Komisi ini.

Oleh sebab itu Saudara Kapolri, kami, saya dan teman-teman berharap 11 program yang sekarang menjadi promotor ini. ini betul-betul menjadi program yang

ditindaklanjuti dengan segala konsekuensinya. Yang utama tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa Saudara Kapolri pernah mengatakan saya Kapolri dari semua angkatan. Ujung-ujungnya adalah penempatan *the right man, the right place* dan peningkatan profesionalisme. Terkait apa? Terkait promosi dan mutasi jabatan. Kalau kami di Komisi III ini tentu fungsi kami selain fungsi pengawasan dan control, kami juga punya fungsi budget dan fungsi anggaran. Tentunya selama ini sudah terbukti bahwa Komisi III sangat mendukung Polri. Siapa pun Kapolrinya. Komisi III sangat mendukung dan sudah kami buktikan berperiode-periode. Anggaran Polri dari tahun ke tahun terus bertambah. Karena kami tahu bahwa dalam tugas dan fungsi Polri membutuhkan dukungan politik maupun anggaran dari Komisi III. Namun masih saja kasus demi kasus terus terdengar didalam RDP. Kasus pasar turilah, kasus 15 perusahaan yang di SP3-kanlah, kasus Kaltimlah, masih terus dan saya bosan. Saya sudah 3 periode, 10 tahun lebih saya disini terus saja begitu. Artinya peningkatan kualitas pelayanan dan professional belum mencapai maksimum sementara anggaran terus bertambah. Infra struktur terus naik. Yang mengherankan begini, kalau kasus *human trafiking*, pengungkapan terorisme, kejahatan umum lainnya seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan. Terus terang saja kita angkat topi. Polisi Indonesia top markotop. Saya tidak ragukan kemampuan Polri dan anggotanya dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan apa pun itu. Namun kalau sudah terkait kasus-kasus spesifik, muncullah persoalan.

Nah hari ini, muncul di media adalah 15 perusahaan yang bosnya konon duduk-duduk, kongkow-kongkow dengan petinggi Polri di Polda Riau sana. Saya sebagai DPR dan sebagai masyarakat tidak terlalu paham, ini kongkow-kongkow ini ngapain? Tetapi sebagai manusia, sebagai DPR ada terusik rasa keadilan. Baru ribut-ribut 15 perusahaan di SP3-kan kok sudah muncul lagi foto bahwa ada anggota Polri, petinggi Polri di wilayah duduk-duduk dengan bos-bos perusahaan tersebut. Kalau mau jujur ngomong tidak ada yang salah secara hukum. Tetapi secara etika ini mengusik rasa banyak orang. Pertanyaannya begini, kenapa di SP3-kan. Menurut saya, SP3 juga tidak salah. SP3 adalah bagian dari memberikan kepastian hukum. Namun yang diperlukan adalah SP3 itu diberikan penjelasan kepada para pihak, contoh: kami yang berhak tahu dalam fungsi pengawasan kami. Mungkin saya usulkan supaya tidak terjadi perdebatan, Polri yang bersangkutan memberikan klarifikasi atau memberikan paparan tertutup kepada Panja penegakan hukum misalnya, tidak di RDP terbuka ini. Karena hal itu ada kode etik dan rahasia penyidikan. Sehingga tidak ada curiga diantara kita. Kasus pasar turi, tarik ke Mabes Polri kemudian terkesan terkatung-katung atau tidak jelas. Ini juga menjadi pertanyaan. Memang agak risih bagi kami Anggota DPR kok urusnya urus kasus. Yang dipertanyakan kok kasus, bukan mempertanyakan bagaimana kesejahteraan Anggota Polri. Bagaimana peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, kok lebih focus di kasus. Ini tentunya saya memberikan segala kritik dan auto kritik bahwa ada ruang yang mungkin perlu Polri memberikan penjelasan secara tertutup kepada Anggota DPR khususnya di Panja penegakan hukum sehingga terjadi dialog antara kita. Tetapi pada dasarnya di era Kapolri yang baru ini ada segudang harapan masyarakat karena figure Pak Tito karena ... adalah figure yang menjanjikan sesuai dengan 11 program ini.

Oleh sebab itu Saudara Kapolri langkah-langkah kedepan, kami berharap apa yang menjadi komitmen yang tadi dipaparkan kemudian komitmen kami juga Komisi III mendukung Saudara Kapolri dan jajarannya, mendukung institusi Polri kedepan supaya lebih bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bisa memberikan rasa aman

kepada masyarakat, contoh yang konkrit kejadian beberapa hari yang lalu, perampokan di Pondok Indah. Polisi dengan gagah menunjukkan kehadiran negara. Pada saat rakyatnya merasa membutuhkan pengamanan dari Polri. Ini hal yang membanggakan, dan kami berharap juga kedepan hal-hal yang positif semacam ini juga dikedepankan. Tidak melulu soal kasus yang tidak profesional yang selalu menjadi pertanyaan padahal belum tentu ada masalah. Mungkin saja SP3 itu benar karena SP3 itu kepastian hukum tapi mungkin komunikasi penjelasan. Usul konkrit saya supaya dalam kasus-kasus konkrit, kasus pasar turi, kasus Riau supaya Polri hadir untuk memberikan penjelasan tertutup pada Panja penegakan hukum di Komisi III.

Demikian dari saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Ria ada tambahan? Kalau sama cukup.

F-PDIP (DWI RIA LATIFA):

Terima kasih Pimpinan.

Ijin Pak Ketua Poksi. Saya melengkapinya tapi tentu ada hal yang lain juga. Saya setuju Pak Herman Herry katakan bahwa kita tidak usah mengurus satu kasus per satu kasus. Tapi kalau itu kasusnya tidak berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Kalau yang menyangkut kebakaran hutan terutama yang di Riau atau didaerah lain itu bukan persoalan sepele. Kita sudah katakan dengan tegas bahkan negara dalam arti Presiden juga sudah turun tangan bicara tentang persoalan asap, nyawa manusia. Dalam kondisi seperti itu saya setuju karena saya memang juga *background*-nya pengacara. Saya tahu ada perkara yang bisa di SP3. Tapi perkara apa, dilihat dulu. Apalagi bagaimana kita tidak bisa melihat yang namanya kecurigaan atau asas praduga. Apabila dalam kondisi kita bicara tentang asap berkaitan dengan nyawa masyarakat, hubungan dengan negara asing tiba-tiba dikejutkan lagi kongkow-kongkow yang model seperti ini. Saya tidak yakin ini ucapan Pak Guntur, siapa nih Pak Guntur? Dengan gagah perkasanya membantah bahwa PT APSL termasuk salah satu perusahaan yang tengah diselidiki, tidak membantah maksud saya disini terkait perkara yang diselidiki tentang kebakaran hutan tapi tidak membantah tapi tidak yang termasuk di SP3-kan. Kalau perkara yang sedang diselediki menurut saya bukan hanya masalah etika tapi juga persoalan apakah layak kongkow-kongkow dengan gaya begini sementara perkara sedang diselidiki. Apa pun alasannya pindah dari satu meja ke meja yang lain, ada minuman keras katanya kemudian dianggap kebetulan bertemu sebuah hotel, entah bla-bla-bla apalagi baca saja di Sosmed atau di media, saya rasa itu gak wajar. Di cek dan ricek menurut saya Pak Kapolri yang saya hormati. Itu pertama.

Kedua, saya juga ingin bertanya persoalan yang tadi Pak Kapolri katakan tentang kasus statement Pak Harry Azhar. Apa yang Bapak sampaikan tadi satu per satu saya catat, tapi saya juga mendapat informasi tentang apa yang disampaikan oleh tim ada satu

yang menurut saya tertinggal, apakah informasi yang saya dapat ini salah atau informasi yang Bapak sampaikan dalam buku ini yang kurang lengkap. Disini disebutkan bahwa memang betul menyangkut nama-nama aparat. Benar tidak disebut setidaknya 3 nama, namun tidak dalam kaitannya dengan aliran dana sebagaimana kesaksian FB terhadap HA. Memang sengaja tidak menyebutkan tentang inisial aparat tersebut supaya tidak mengganggu potensi lebih lanjut dalam hal penyelidikan atau bahkan nanti penyidikan. Tapi yang saya tangkap disini, yang saya baca disini berbeda secara resmi dokumen Pak Kapolri bahwa tidak menyebutkan tentang adanya aparat, kalau tidak salah seperti itu antara lain. Tadi saya baca, belum ditemukan fakta yang membenarkan keterangan Freddy Budiman, namun memang masih dalam penyelidikan tapi tidak ada menyebutkan secara spesifik seperti yang tadi yang saya bacakan. Saya mohon clear, supaya tidak ada dusta diantara kita. Kita sudah katakan Indonesia gawat narkoba. Kita perang sama narkoba. Tapi apabila itu menyangkut aparat menurut saya sebaiknya lebih tegas dan transparan, jangan takut seolah-olah nanti institusinya rusak namanya. Dari saya itu.

Yang ketiga, mungkin akan terlibat subjektif. Karena saya dari daerah pemilihan kepulauan Riau. Kalau tadi Pak Benny katakan masalah trafficking dari kampungnya Pak Benny. Daerah lahir saya, NTT saya pertegas kampungnya Pak Benny Karman. Daerah saya Kepulauan Riau. Daerah transitnya, Batam, Karimun, Tanjung Pinang, dan sekitarnya. Kalau Bapak bisa mendapatkan seperti itu di NTT, saya yakin Bapak akan bisa membongkar lebih besar di kepulauan Riau sebagai daerah transit. Kemudian bagaimana mungkin Polda Kepri bisa melakukan yang terbaik sebagai polisi di daerah perbatasan apabila kapal patrolinya Cuma 1 dan kemudian bocor pula beberapa bulan yang lalu ketika sedang bertugas. Menurut saya Pak Kapolri, tolong juga dilihat mana yang lebih penting ketika anggaran itu diturunkan bukan sekedar hanya membagi-bagi rata. Lihat yang spesifik, dimana letak daerah-daerah yang memang memerlukannya.

Terima kasih Pak Kapolri. Dari saya itu saja.

Terima kasih Pak Ketua.

Terima kasih tentu saja Pak Kapoksi.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Pak Junimart pendek ya.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh gak jadi Pak Junimart.
Ya silakan.

F-PDIP (JUNIMART GIRSANG):

Pak Kapolri dan jajarannya,

Saya ada 4 pertanyaan, singkat-singkat saja ini Pak. Yang pertama tentang anggaran yang Saudara Kapolri tidak singgung secara tegas. Karena seingat saya anggarannya sudah dipotong 2,9 Triliun. Pertanyaannya apakah dengan pemotongan ini penegakan hukum dalam 2 Polri itu berpengaruh kedalam maupun keluar. Karena hasil kunjungan-kunjungan kami ke daerah. Para Kapolres itu semua mengeluh Pak disana.

Yang kedua, kalau ada pertanyaan mengenai kebakaran hutan. Saya agak lain Pak Kapolri. Kalau mau jujur, ini kan masalah penegakan hukum. Kalau ada yang merasa keberatan silakan saja ajukan pra peradilan ke pengadilan. Jadi tidak perlu kita membuat opini, tidak perlu kita ribut sana-sini, siapa yang merasa dirugikan. Silakan gugat melalui pra peradilan ke pengadilan, selesai masalahnya Pak. Jadi polisi juga tidak perlu terlalu reaktif menyikapi ini.

Yang ketiga, Polri ini galak kedalam Pak. Kalau ke internal galak dia Pak. Tetapi kalau keluar dalam tanda petik saya lihat ada pencitraan. Contoh misalnya ada 2 kasus yang menutup pada bulan Juli, Tana Karo dan Tanjung Balai, asahan yang tadi Pak Kapolri sudah singgung. Saya terus terang tidak bisa menerima dengan cara Polri secara reaktif mengambil sikap, mencopot tanpa melakukan kajian yang mendalam. Karena dengan alasan 1 desa meminta agar Kapolres dicopot dari 100 lebih desa di Tana Karo, Polri dengan cepat mencopot Kapolresnya. Saya selaku putra daerah sana Pak, saya tahu bagaimana sikap emosional masyarakat disana. Bagaimana mungkin masyarakat menyerang Polres dengan tiba-tiba bahkan merusak fasilitas negara, bisa ditolerir oleh Polisi Pak. Bagaimana mungkin polisi terluka, masyarakat tidak ada yang terluka oleh polisi langsung, polisi dipermasalahakan Pak. Kalau Pak Kapolri mungkin mendapatkan laporan dari hasil turunnya Pak Jenderal Polisi ke Tanah Karo. Satu hal yang perlu didalami disana Pak, ada Kapolres ini tidak menjadi rusak namanya Pak dan tidak menjadi terhambat pangkatnya. Sewaktu kejadian, bahwa ada penembakan, ada kematian. Itu pertanyaannya. Polisi tidak pernah melakukan penembakan Pak, kok ada kematian. Dan kemana pula dan kemana pula itu selongsong peluru Pak. ini perlu Pak Kapolri melakukan ... kembali Pak. Masyarakat kecil “merusak fasilitas negara”, melempar kantor polisi, melempar Mako Polres Pak, dimana wibawa Polri. Sampai sekarang saya tidak melihat sikap Polri dalam penegakan hukum terhadap masyarakat 1, 2, 3 orang yang diproses Pak secara tuntas, tidak ada Pak. Saya kemarin telepon ke Tanah Karo. Jadi kalau Polri diam dengan situasi ini maka ini menjadi presedent ke depan Pak. Masyarakat tidak akan takut kepada polisi Pak, Polsek akan dilempar-lempar Pak. Mako Polres dibakar Pak. Tadi Pak Kapolri sudah jelaskan. Jadi tolong Pak ini diperhatikan. Jangan sampai para Kapolres, Kapolsek menjadi korban. Mereka juga perlu dilindungi Pak. Agar jangan sampai Kapolsek atau polisi ini takut Pak untuk bertindak Pak. Takut kepada rakyat. Ini perlu saya sampaikan. Nah pertanyaannya, kenapa sampai timbul masalah di tanah karo Pak Kapolri. Fungsi intelijen menurut saya tidak berjalan Pak, tolong dievaluasi nih Pak. Bagaimana fungsi intelijen, di Polres Sumatera Utara, di Polres Tanah Karo, menurut saya tidak jalan Pak. Tidak berjalan Pak.

Yang keempat, kalau kita mau jujur Pak Kapolri. Tolong agar Pak Kapolri tegas terhadap angkatan lain Pak. Di balik kerusuhan ini Pak “ada angkatan lain” yang mem-*backup* Pak. Saya tidak perlu buka di forum ini. Terakhir saya ke Tanah Karo dengan Pak

Rohut Sitompul Pak. Lebih dari 11.000 masyarakat GBKP demonstrasi disana Pak. Teman-teman polisi trauma Pak menghadapi masyarakat. Kami datang dengan Pak Rohut dan Pak Azwar kesana dan ternyata dengan pendekatan edukasi, pendekatan kekeluargaan selesai Pak, mereka bubar dan masalah clear disana Pak. Saya tanya kepada ... kenapa *you* tidak turun, kami sudah trauma Pak. Kami biarkan saja, kami mengawasi. Loh kalau mereka melakukan ... tidak baik, bagaimana? Ya sudah Pak, kami tunggu saja situasi. Tolong Pak Kapolri agar betul-betul melihat ini.

Nah yang terakhir Pimpinan, ini masalah narkoba dan judi. Ini dimana-mana marak sekali Pak. Hampir semua Kapolres mengeluh Pak. Saya hanya bertanya kenapa masalah narkoba dan judi tidak pernah bisa tuntas didaerah kita ini. Jawaban mereka sederhana mereka. Kalau kami menangkap Pak, tiba-tiba nanti depan Polres motor lewat di gas, muter-muter, mereka pulang Pak bolak-balik. Kalau saya bilang kenapa Pak. Ada angkatan Pak yang memback-up ini. Memang betul Pak. Nah oleh karena itu bagaimana caranya Polri bisa membangun komunikasi dengan Pimpinannya Pak karena sudah menjadi rahasia umum masalah narkoba dan judi tidak akan pernah tuntas karena di back-up oleh angkatan diluar Polri itu sendiri Pak. Jadi jangan kita berbicara tentang narkoba dan judi, tentang Freddy Budiman yang sudah mati tapi bisa memberikan kesaksian. Saya tidak masuk diakal itu Pak. Kenapa tidak waktu hidup saja ngomong Pak, sudah mati ditembak ngomong dia Pak. Polisi reaktif lagi. Menerima. Kalau saya Pak nyelidik saja itu Pak. Dan Polri juga jangan terlalu terbuka untuk mengungkap, apa pekerjaan ... dari Polri Pak. Lidik saja, terima saja Pak. Panggil Harry apa, saya lupa namanya tuh. Panggil saja Pak, periksa. Jadi jangan takut kepada tekanan LSM. Kan begitu Pak. Panggil saja Pak. Kan toh dia sudah memberikan keterangan. Kalau tidak benar keterangan palsu Pak. Kenapa tidak. Jadi jangan membuat suatu isu dan itu disebut menjadi testimony Pak. Itu bukan testimony, wong sudah meninggal Pak kok bagaimana testimony Pak.

Jadi demikian Pimpinan dari saya agar menjadi koreksi kedepan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Junimart.
Golkar.

F-PG (IR. ADIES KADIR, SH., M.HUM):

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati,
Pak Kapolri beserta jajaran,**

Menindaklanjuti apa yang disampaikan kawan-kawan tadi Pak memang kami tidak ingin masuk terhadap kasus-kasus tetapi memang terhadap kasus-kasus yang sangat menjadi perhatian public tentunya kami ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan sebagai fungsi pengawasan kami.

Terkait dengan kasus Freddy Budiman tadi Bapak sampaikan bahwa telah dibentuk tim investigasi Freddy Budiman. Kawan kami juga dari PDIP Pak Junimart menyampaikan bahwa semestinya kepolisian tidak juga terlalu mendengarkan opini atau

perkataan-perkataan dari seorang gembong narkoba yang sangat berbahaya dan jelas-jelas orang ini adalah penjahat kakap yang banyak merugikan anak bangsa kita. Tetapi begitu ada statement sedikit saja yang menyangkut dengan Pimpinan, petinggi angkatan, apakah itu Polri dan TNI seakan-akan penjahat kakap ini dianggap sebagai pahlawan. Nah yang sedikit kami sesalkan bahwa terlalu reaktif juga tanggapan daripada pihak-pihak kepolisian dengan membentuk tim investigasi. Kami ingin menanyakan sebenarnya apa urgensi melibatkan tim, membentuk tim investigasi dan melibatkan tim eksternal. Kenapa tidak hanya irwasum, propam yang menangani. Apakah irwasum, propam ini kemampuannya diragukan untuk menangani ini. Setahu kami irwasum dan propam terhadap kasus-kasus internal ini sudah sangat mumpuni setahu kami Pak dari dulu. Oleh karena itu kami khawatir nanti apabila ada sedikit permasalahan muncul seperti kasus Freddy Budiman ini, kemudian dibentuk tim investigasi melibatkan tim eksternal. Apabila nanti besok ada lagi kasus-kasus seperti ini, jadi masyarakat ingin menuntut. Tidak lagi kembali kepada irwasum dan propam tapi kenapa waktu Freddy Budiman bisa dibentuk tim investigasi dengan gabungan eksternal tetapi dengan kasus-kasus ini kok tidak. Nah kami khawatirkan Pak itu nanti. Kalau ini seperti itu.

Jadi pertanyaan kami, kenapa bukan irwasum saja dan propam yang melakukan investigasi ini dan kenapa juga melibatkan tim eksternal.

Kemudian terkait dengan SP3 Riau, kami juga banyak mendengar laporan-laporan dari kawan-kawan kepolisian disana. Memang kepolisian sekarang ini seksi Pak. jadi sedikit saja sudah diberitakan luar biasa padahal kawan-kawan di kepolisian pun disana sudah menjelaskan sebenarnya. Mereka lagi sedang rapat juga, kemudian. Tetapi media ini seakan-akan tidak mendengar. Kami mengharapakan Pak. Jangan kalah media juga. Pak Kapolda mestinya lebih juga menjelaskan. Kapolda Riau hadir ya Pak ya? Mohon nanti dijelaskan kepada kami sebenar-benarnya karena secara pribadi kami lebih percaya juga dengan kawan-kawan kepolisian disana. Beberapa kawan yang kami sampaikan. Masa sih beraninya pejabat-pejabat dan bahkan dari Mabes juga yang hadir mempertaruhkan jabatan hanya untuk kongkow-kongkow. Jadi kami tidak percaya sebenarnya ini Pak. Tolong nanti Pak Kapolda menjelaskan dengan baik. Dan jangan sampai medianya ini kalah Pak. Medianya di Riau itu mestinya harus juga lebih gencar menyampaikan bahwa tidak terjadi hal-hal seperti yang disampaikan disana. Kami ingin mendengar penjelasan dari Pak Kapolda. Kemudian terkait dengan kasus di Kalimantan Timur. Kebetulan saya juga ikut hadir disana memang. Pak Kapolda disana sudah menjanjikan akan segera untuk menangkap. Tetapi disampaikan tadi bahwa begitu dicari orang ini sudah lari ke Singapura.

Nah pertanyaan kami begini Pak, ada kasus seseorang dari Jawa Timur itu lari ke Singapura sangat cepat Pak ditangkap, diblokir paspornya, kemudian tidak sampai 1 bulan juga sudah berhasil ditangkap. Kasus nanyala. Cepat sekali itu. Nah ini kok terhadap seorang buron yang kira-kira juga sama tetapi kok waktunya lama. Ini bagaimana prosesnya kok bisa lama, kok ada 1 kasus juga bisa cepat. Kami mohon penjelasan itu dari pihak kepolisian.

Kemudian terkait dengan pasar turi. Kebetulan ini di Dapil saya. Ini kasus memang, kalau menurut hemat kami memang agak susah dan pelik. Ini kalau mau dibuka semua. Ini pejabat-pejabat Pemerintah kota kena semua ini dari awalnya. Karena semua *one prestasi*. Pemerintah kotanya *one prestasi*, investornya juga *one prestasi*. Investor menjanjikan strata title, kemudian strata titlenya tidak bisa dikeluarkan. Karena

membutuhkan sertifikat. Sertifikatnya ditahan oleh Pemerintah Kota. Nah ini kalau diruntut-runtut semua *one prestasi*. Jadi memang kalau mau perlu keberanian, sekalian berani dipanggil semua itu bukan hanya Walikota yang sekarang, mulai dari Walikota yang lama juga. Itu juga kena. Tapi memang yang harus dicari adalah solusi bukan mencari suatu kesalahan. Namanya ini seperti *force merger* begitu, saya harapkan Bareskrim bisa memberikan penyelesaian yang baik, apakah itu kepada investor Pemerintah Kota ataupun kepada masyarakat pembeli daripada pasar turi tersebut.

Kemudian kami ingin juga menanyakan persiapan arus mudik Idul Adha. Jangan sampai terjadi lagi korban-korban nyawa terhadap masyarakat yang ingin pulang kampung bertemu dengan keluarganya seperti Idul Fitri kemarin. Kami ingin menanyakan kesiapan dari Polri termasuk arus-arus yang lewat pantura itu agar supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang meninggalkannya orang-orang yang ingin pulang kampung pada saat Idul Fitri kemarin.

Terakhir Pak Kapolri, kami ingin menanyakan juga perkembangan penanganan krisis BPKB dan STNK. Kami ingin menanyakan perkembangannya seperti apa terakhir karena kami masih mendengar, masih banyak kekosongan-kekosongan formulir BPKB dan STNK ini di daerah-daerah, di Jawa dan di luar Jawa. Kami ingin mendengar keterangannya seperti apa perkembangannya sampai saat ini.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

Kami akhiri.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Adies.

Golkar lain tidak ada.

Gerindra.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH., MH):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Anggota Komisi III,
Saudara Kapolri beserta jajarannya,**

Pertama-tama ada beberapa hal yang mungkin saya akan pertanyakan dalam hal ini adalah pertama kasus pasar turi. Kasus pasar turi ini mempunyai dampak. Kalau tadi rekan-rekan semuanya sudah membahas masalah pasar turi tetapi disini adalah masalah pasar turi. Dampak yang ada itu adalah dampak social. Yang dimana hingga saat ini pedagang belum bisa masuk. Jadi apabila kasus ini tidak cepat diselesaikan maka yang terjadi adalah pedagang ini pun begitu lama mereka menunggu kepastian ini. Pada awalnya kasus ini sudah ditangani oleh Polda Jawa Timur dan P19-nya di Polda Jawa Timur tetapi saya mendengar justru permasalahan ini menjadi melemah pada saat ini

diambil di Bareskrim di Mabes Polri. Mungkin juga perlu diperjelas lagi kenapa hal ini bisa ditarik kepada Mabes Polri. Seharusnya kalau memang ada penguatan itu di Polda Jawa Timur biarkanlah ini di Polda Jawa Timur. Karena isu yang berkembang penarikan dari Polda Jawa Timur ke Bareskrim ini tidak juga, isu yang mengatakan adanya lobi-lobi sehingga kasus ini bisa ditarik ke Bareskrim. Nah ini perlu ada suatu penjelasan dari Kapolri, apa alasannya sehingga kasus ini ditarik kepada Bareskrim Mabes Polri.

Kemudian yang kedua, pada program kerja Kapolri. Program kerja prioritas salah satunya adalah peningkatan pelayanan public yang berbasis TI. Baru-baru ini mendengar Kapolri dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Timur ada 6 Polres yang melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan berbasis TI. Salah satunya adalah Polres Bojonegoro dengan system *crime alarm system*. Permasalahan daripada inovasi ini adalah bagus untuk perkotaan. Namun kebetulan itu adalah Dapil saya. Saya melihat bahwa secara geografis system itu akan menemui kesulitan apabila tidak diimbangi oleh system operasiona penanganannya. Karena dengan luas jangkauan maka apabila ada laporan itu tentunya mobilisasi daripada anggota itu akan terhambat. Nah ini diperlukan kendaraan-kendaraan operasional. Mungkin untuk beberapa daerah seperti daerah-daerah yang seperti Bojonegoro ini yang diperlukan adalah sepeda motor untuk mempercepat daripada penanganan ini. Hal ini perlu kita dorong system ini karena system ini adalah bisa menjadi embrio kalau di Amerikanya 911. Dan ini adalah salah satu hal yang juga bisa meningkatkan daripada peningkatan penanganan polisi didalam pengaduan masyarakat.

Kemudian yang ketiga adalah mengenai masalah peningkatan kesejahteraan Polri. Pada saat *fit and proper test* pernah saya sampaikan bahwa tingginya anggota polisi yang melakukan bunuh diri. Dan ini tidak ubah juga ada masalah daripada permasalahan kesejahteraan. Kemudian setelah kami dalam permasalahan ini. Ternyata ada hal yang mungkin juga perlu Kapolri melihat bahwa disini ternyata tunjangan seorang Brigadir Polisi itu sama dengan Tantama TNI. Kesenjangan ini tentunya bisa mengakibatkan terjadinya kalau istilahnya ... pengolahan kasus-kasus untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Kalau itu anggotanya bisa melakukan itu. Tetapi beberapa anggota yang mungkin tidak bisa melakukan itu atau memang dia patuh, maka yang terjadi adalah depresi itu tadi. Nah dalam hal ini mungkin Saudara Kapolri bisa memberikan satu peningkatan terhadap masalah rumanerisasi ini karena baru termamfaatkan 40% dari Polri sedangkan dari TNI sudah mencapai 60%. Nah hal inilah mungkin yang bisa melihat memberikan suatu kinerja yang lebih baik lagi pada anggota Polri.

Kemudian menggarisbawahi masalah kasus juga yang masih juga menjadi perhatian adalah masalah judi *online*. Baru-baru ini Philipina sudah melegalkan judi *online*. Dan banyak server-server judi *online* Indonesia itu sekarang di Philipina. Dan beberapa informasi yang kami dapatkan bahwa bandar-bandar judi *online* itu merelay di Indonesia ini dengan menyewa beberapa tempat-tempat karaoke. Nah ini perlu juga penanganan yang serius terhadap masalah judi *online* ini, baik di Jakarta, Medan, Surabaya dan kota-kota besar lainnya.

Saya kira demikian beberapa hal yang saya sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Supratman.

F-GERINDRA (SUPRATMAN ANDI AGTAS):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pertama-tama saya hanya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas prestasi yang telah dicapai dalam rangka pemberantasan terorisme dan operasi yang dilaksanakan di Poso. Sekali lagi saya berikan apresiasi yang tinggi, mumpung Pak Kapolda juga ada disini. Ada Pak Rudi. Mudah-mudahan apa yang dicapai ini bisa memberikan semacam penegasan kepada Bapak Kapolri untuk memberi perhatian khusus kepada seluruh aparat yang ada di Poso sana.

Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, ini mungkin hanya komunikasi ke public Pak Kapolri yang perlu diperbaiki. Terutama yang berkaitan tadi dengan kasus yang ada di Riau. Sebenarnya soal SP3 sekali lagi ini barang yang halal, tidak ada masalah dalam hukum acara kita semua dibenarkan tetapi mungkin dalam pelaksanaannya maupun dalam proses pengambilan keputusan sebuah SP3 itu sedapat mungkin begitu ada SP3 yang diterbitkan itu bisa segera dikomunikasikan dengan public supaya jangan seakan-akan nanti kelihatan bahwa ada sesuatu hal yang ada dibalik itu. Nah oleh karena itu, karena ini kan masalahnya Cuma proses penerbitan. Yang mulai Januari dilakukan sampai kemudian diakhir Mei atau Juli kalau tidak salah. Nah mungkin setiap kali ada penerbitan, baik itu di bulan Januari. Itu pada saatnya juga bisa dirilis kepada public, itu pasti akan sangat mengurangi resiko-resiko menyangkut kecurigaan kepada aparat Polri. Nah itu mungkin saran konkrit saya dalam pelaksanaan tugas kedepan.

Berikutnya adalah memang ada beberapa catatan penting yang menjadi problem dan bisa menjadi perhatian. Saya yakin dan percaya dibawa Pak Tito Karnafian yang luar biasa dalam pemberantasan terorisme. Kita tahu prestasi luar biasa Polri kita patut acungin jempol. Nah oleh karena itu mungkin bisa diikuti dalam penegakan hukum yang lain termasuk didalam mereduksi terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan kecurigaan-kecurigaan public Pak terhadap penanganan-penanganan kasus tertentu. Nah oleh karena sekali lagi kedepan komunikasi ke public ini perlu ditingkatkan sekaligus untuk mengeliminair semua hal-hal yang berkaitan dengan kecurigaan public tadi.

Demikian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Demokrat.

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Kapolri beserta jajarannya yang saya hormati,

Erma Ranik Demokrat, Kalimantan Barat.

Pak Kapolri,

Pertama-tama, terima kasih karena sudah menaikkan status Polda Kalbar sesuai dengan usulan kami dari sejak awal sehingga sekarang dengan luasan jarak dan tantangannya Polda Kalbar bisa meningkat statusnya. Mudah-mudahan ini juga dibarengi dengan peningkatan personil dan juga tentu saja kapasitas teman-teman di Polda Kalbar.

Yang kedua Pak Kapolri, Komisi III sudah membuat Panja untuk penegakan hukum secara khusus tentang kebakaran hutan dan lahan. Saya tidak ingin masuk lebih dalam kesana karena soal SP3 soal dan seterusnya saya yakin akan lebih didalami kesana. Cuma saya agak terganggu dengan beredarnya foto-foto aparat Bapak di Riau. Orang-orang yang dikatakan adalah salah satu perusahaan yang merupakan perusahaan yang di SP3. Saya terganggu Pak Kapolri karena di kampung saya di Kalimantan Barat itu juga beredar foto aparat Bapak juga membawa senjata jagain orang kampung, orang Dayak yang meladang pakai senjata. Kalau disanding-sandingkan ini kan sesuatu yang sangat tidak pas. Kami di Kalimantan Barat sana orang-orang kampung sekarang ketakutan berladang karena takut dituduh sebagai pembakar hutan dan lahan. Padahal Undang-Undang membolehkan masyarakat tradisional untuk berladang. Nah ini saya yakin ini akan bisa didalami. Saya tidak tahu mungkin perlu penjelasan dari Pak Kapolri terkait foto di ruang rapat Komisi III ini.

Yang kedua, tanggal 4 September kemarin kita dikejutkan dengan satu *presilist* yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup terkait ditahannya penyidik pegawai negeri sipil di daerah Rokan Hulu ini juga terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Pak Kapolri saya ingin tanyakan kepada Bapak selaku Pimpinan penegak hukum di Republik ini, apakah aparat Bapak mengetahui tentang tindakan masa atau oknum massa atau oknum perusahaan yang melakukan pencegahan kewenangan negara dalam melakukan penegakan hukum. Kebakaran hutan dan lahan ini bukan isu kecil. Tahun lalu kita semua sesak nafas, banyak bayi-bayi mati akibat soal kebakaran hutan dan lahan. Tahun ini Pemerintah sudah berusaha dengan keras untuk mencegahnya secara maksimal.

Saya ingin dijelaskan dalam ruang rapat Komisi III ini kejadian memalukan Pak Kapolri. Ini institusi negara. Kementerian Lingkungan Hidup itu institusi negara. Sampai tidak bisa melaksanakan tugasnya. Yang ingin saya tanyakan, dimana tugas teman-teman kepolisian mengawal wewenang dari negara ini. apakah itu diketahui, tidak diketahui atau sengaja dibiarkan.

Saya kira itu saja Pak Ketua pertanyaan dari saya. Selanjutnya nanti Pak Ruhut Sitompul.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (RUHUT POLTAK SITOMPUL):

Terima kasih Ketua.

Pak Desmond dan semua Pimpinan.

Pertama, selamat keluarga besar Polri yang mana lusa akan di fit and proper test, Bapak yang kita akrab Pak Bege. Suatu sukses yang sangat besar bagi kepolisian karena kita tahu kalau bicara BIN untuk bisa menjadi Pimpinan BIN pasti kita tahu TNI, Polri banyak yang terbaik tapi *why not the best*. Dan Bapak Presiden yang mempunyai hak preogratif memberi kepercayaan kepada Pak Budi Gunawan. Itu yang pertama. Selamat Pak.

Kemudian yang kedua, tetap yang kami hormati Bapak Kapolri. *Reward and punishment*.

Pak Kapolri,

Orang banyak menilai kepolisian setelah selesai bekerja. Oh begitu saja. tetapi paling tidak harus diberi reward kepada semua Bapak-bapak Kapolda Bapak ini, Pak Kapolri. Contohnya kemarin peristiwa Pondok Indah. Saya rasa perlu diberi reward kepada Kapolda yang langsung turun ke bawah. Ini menunjukkan rasa simpati ke rakyat. Di Jakarta ini mereka dilindungi. Begitu juga Kapolda kita di Jawa Barat, Kalimantan Timur. Saya bersama Pak Tjondro waktu peristiwa bom di Solo kami turun beberapa hari Pak waktu malam takbiran. Pak Tjondro ini juga turun. Begitu juga Pak Kapolda-kapolda Pak Raden Pak Kapolda saya di Sumut, wah gak main-main Pak. Tadi disinggung oleh Pak Junimart, itu betul Pak. Kami sedih Pak. Kita tahu saya ikut membidangi di kedepannya kepolisian sebagai Kamtibmas. Tapi masih ada saja ganjalan di kawan-kawan Saudara kita dari TNI walaupun saya keluarga TNI. Saya putra seorang polisi militer. Tapi Pak, tolong jangan anak buah Bapak yang sudah bekerja dengan baik itu menjadi kambing hitam. Perlu di usut kaitan dengan selongsong yang tidak jelas. Di Tanah Karo karena saya turun disana langsung Pak bersama Pak Junimart dan Pak Asrul. Saya tahu ini masalah lahan Pak. Kita tahu disana bencana alam selama ini siapa yang menangani masalah itu. Sekarang kepolisian Pak. Jangan giliran kepolsian sudah kerja baik di kambing hitamkan.

Saya terima kasih dengan Pak Raden Pak. Pak Kapolda Bapak juga harus diberi reward. Karena pada waktu itu kami ikut mengantarkan Kapolres yang baru Pak. Saudara Nababan itu juga orang baik dan yang digantikan ini juga orang baik. Pak, tolong di reward juga Pak karena Beliau dari Brimob, dari Densus orang yang kerjanya baik Pak. Harus diusut itu Pak. Beliau kena fitnah Pak. Kami antar ke Polres dengan Pak Junimart, dengan Pak Asrul dari PPP. Ini Sekjennya kalau saya salah-salah suka negor saya Pak. Pak Sunny. Jadi Pak, ini ilustrasi saya mengenai kepolisian. Tadi sudah disinggung dengan sahabat saya Pak Ery Pak. ini betul dari PDI-Perjuangan Pak. Kenapa saya katakan demikian Pak. Memang tugas kami legislasi, budgeting dan pengawasan.

Kami ingin mengangkat ini secara bersamaan karena Kamtibmas kepolisian itu sudah betul-betul ujung tombak dan selalu bekerja dengan baik.

Kaitan dengan Riau, kami juga turun Pak. Saya lihat ini Kapoldanya ini mukanya tidak berdosa. Saya baru kenal Pak, dia baru jadi Kapolda Pak. Tapi walaupun saya baru kenal 2-3 jam saya langsung sayang Pak. Dia orang baik Pak. Dia orang baik Kapolda Bapak. Saya tegas Pak, kalau baik saya katakan baik. Pak, kita tahu kalau Pak Kapolri kita itu seorang yang jenius, seorang yang mempunyai prestasi hebat Pak Tito. Perlu juga Pak, ini memang Pak. Disini ada juga Bapak Aridono Reskrim kita capek menerima laporan-laporan Pak kaitan Medsos ini Pak. Ide Bapak perlunya ada chanel. Saya rasa yang baik dari China kenapa tidak kita tiru. Perlu nih Pak. Adu domba, apa ini semua, menghina, memaki-maki orang Pak. Giliran dibalas memaki merasa di terdzalimi. Jadi perlu Pak ada chanel mengenai, khusus Pak. Diawasi ini semua Pak. Kalau gak gawat Pak. Kita terdiri dari sekian ribu pulau, suku, agama ini bisa diadu Pak. Contoh seperti Tanjung Balai, Dapilnya Pak Junimart Pak. Ini harus Pak. Harus diperhatikan. Dan juga Bapak-bapak yang saya hormati saya terima kasih. Sekarang Kamtibmas itu dari Sabang sampai Papua. Semua berjalan dengan baik. Memang kerjasama dengan TNI harus tetap dijaga tetapi tetap equality dijaga juga Pak. Polisi itu bukan adik lagi, sama. Polisi itu Kamtibmas. Tidak usah takut Pak. Apabila ada yang salah bongkar semua.

Terakhir Pak, ini memang saya dari awal. Kalau di kampung saya ketemu ular sama orang yang mukanya mirip itu, itu yang duluan dibunuh. Karena kerjanya jadi profokator saja. Kita sudah tahu itu Pak. Betul. Orang sudah meninggal, bandar. Saya teringat waktu saya belum kader Demokrat, saya kader Golkar, rambut aku mirip kayak dia Pak. Jangan-jangan dia idola sama aku itu Pak. Dia cat-cat kuning nih kawan. Cuma bedanya Pak, walaupun aku bintang film, bintang sinetron gak pernah main artis Pak. Dia artis dia bawa ke LP. Berapa banyak korban. Eh masih percaya. Orang yang kaitan narkoba saya penyuluh di BNN. Saya widyaiswara disana Pak. Dari era awal-awal BNN, itu namanya narkoba itu semua penipu, pembohong, kok dipercaya, pengecut. Kan sedih kita dengarnya Pak. Tapi okelah, ini kenegarawanan Pak Tito kita tampung saja bersama LSM-LSM yang selalu bikin kusut ini Pak tapi ada batas waktunya Pak. Jangan lagi aku lihat dia sering wara-wiri di TV, apa itu kayak wajah gak berdosa. Padahal maksudnya mau bikin perang saja, si Harris Ashar itu. Aku gak pernah main belakang. Kubilang namanya, kenapa rupanya. Saya lihat mukanya saja dari jaman Orba sampai sekarang, ini kawan kalau ga jadi profokator apa dia maunya. Jadi Pak, cukup beri batas waktu, kasih pelajaran juga dengan dia. Biar mereka-mereka ini ada efek jera Pak. Polisi sudah kerja baik-baik, kok dikambinghitamkan. TNI juga dikambinghitamkan, gak boleh begitu Pak. Memang dia ada ... kebencian kok Pak. Sebenarnya kalau dia berkawan dengan kami Komisi III apalagi lihat pemimpin-pemimpin saya ini Pak. Ada informasi itu, ajak kita-kita bisa kok, masuk kedalam LP kalau betul informasinya A. Tapi ini kan memang tukang fitnah Pak karena itu dari awal saya bilang, ah bohong kau. Kalau di kampung aku, kau duluan kubunuh bukan ular.

Terima kasih Bapak Kapolda. Bapak-bapak kepolisian, maju terus pantang mundur Pak. Pak Kapolri, Pak Tito, dan Kapolda, Kapolres, Kapolsek, seluruh Indonesia.

Terima kasih Pimpinan.

Merdeka!

KETUA RAPAT:

Memang cocok jadi staf khusus Presiden ini.
Selanjutnya kami persilakan Partai Amanat Nasional.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pak Kapolri dan jajaran, Pak Kapolda,

Perkenalkan nama saya Pak Daeng Muhammad Dapil VII Jabar (Bekasi, Karawang, Purwakarta) 475.

Kaitan tadi sebetulnya teman-teman di Komisi III sudah sampaikan semua berkaitan fungsi pengawasan kita sebagai wakil rakyat, fungsi konstitusi kita, kita lakukan. Mitra kerja kita adalah kepolisian. Kenapa mungkin, saya ingin ungkapkan bahwa apa yang disampaikan itu rasa sayang dan cinta kita kepada institusi kepolisian. Dari satu sisi memang teman-teman mungkin melihat banyak sisi yang sudah dilakukan oleh kepolisian dan itu kita harus berikan reward, berikan penghargaan, kita dukung institusi kepolisian menjadi institusi yang betul-betul mampu memberikan pengayoman. Karena konsep secara Undang-Undang 3 tugas pokok kepolisian yaitu memberikan perlindungan, pengayoman serta menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan hukum. Tadi sudah disampaikan juga oleh Anggota Komisi III yang lain bahwa banyak hal yang sudah diselesaikan institusi kepolisian. Berkaitan dengan persoalan narkoba, persoalan terorisme dan kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada institusi kepolisian. Tapi satu hal juga Pak, sebagai wakil rakyat saya datang dari Dapil VII Jabar. Saya bertemu dengan beberapa anggota legion veteran Republik Indonesia. Saya sering diajarkan ketika saya sekolah dulu, bahkan ada senior saya di PDIP Bang Ahmad Bashara bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai veteran, pahlawannya. Mereka terhimpun dalam legion veteran Indonesia. Jadi ada satu hal kejadian di Karawang yang disampaikan kepada kami, dan ini kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi III bahwa terjadi sesuatu yang jujur saja fungsi kepolisian yang menjadi pengayom buat masyarakat, buat mereka lembaga veteran tidak terjadi di Karawang. Jadi ada kasus kejadian Tahun'74, ada penghargaan terhadap veteran kita dengan memberikan 150 hektar untuk lembaga veteran di wilayah Karawang. Berdasarkan SK Gubernur diberikan kepada LVRI Lembaga Veteran Provinsi Jawa Barat dan tanah itu sudah digunakan sekitar 70 hektar, sisanya 80 hektar itu diwilayah Karawang Barat yaitu desa Margamulya. Fakta yang terjadi adalah bahwa legion itu diberikan surat SK oleh Gubernur, sah Tahun'74. Surat Kakanwil BPN Bandung Tahun 2004, surat Kepala Kantor pertanahan kabupaten Karawang Tahun 2010 dan sah dimenangkan dalam pengadilan negeri. Kenapa ini terjadi peristiwa hal yang diluar konteks yang harus saya bela disana. Kepemilikan mereka itu diserobot oleh perusahaan. Saya kenapa tidak mau bela perusahaan karena ini fakta hukum Pak. Kalau perusahaan ini juga benar mungkin kita bela. Tapi ini legion veteran punya lahan yang dikuasai oleh PT Pertiwi namanya. Dan sekarang apa yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah meminta dan menyuruh kepolisian untuk melakukan intimidasi terhadap para penggarap yang dari veteran. Saya berharap ada atensi khusus dari Pak Kapolri. Mereka datang ke kami, usia mereka 85

tahun. Ada ketuanya lembaga veteran Jawa Barat usianya 91 tahun, mereka menang di pengadilan bahkan ditingkat kasasi pun mereka menang, di pengadilan tinggi mereka dikalahkan. Tapi sekarang yang terjadi disana mereka diintimidasi untuk keluar dari wilayah tanah yang mereka punya hak disana. Jadi mereka sampaikan ke kami bahkan ada surat juga buat Pak Kapolri yang mereka kirim ke Pak Kapolri, tapi saya juga punya copy-annya disini bahkan ada kronologisnya semua. Sebetulnya mereka bicara Cuma 1 hal ke saya. Biarlah prosedur ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Jangan mereka diintimidasi untuk keluar dilahan-lahan itu karena mereka kuasai memang dari Tahun'74. Dan saya pikir saya bangga dengan kepolisian. Karena fungsi kepolisian adalah memberikan pengayoman kepada semua warga negara Indonesia.

Dan harapan saya adalah institusi kepolisian bukan alat kekuasaan, bukan alat penguasa dan pengusaha tapi betul-betul menjadi pengayom buat seluruh warga negara Indonesia. Jujur saja Pak, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan ... 53 Tegal Warule dan yang sekarang banyak dikuasai oleh pengusaha, pemilik modal disana, menggusur para penggarap, menggusur para pemilik tanah, karena eks Tegal Warule dan Perponding 53 itu adalah nasionalisasi negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun'60 menjadi objek ... yang dibagikan kepada masyarakat. Nah ada satu lahan disana sekitar 140 hektar sudah dikuasai legion veteran, dan ini tidak diutik-utik yang 70 hektar. Yang 80 hektar berdasarkan keterangan yang menjual itu pun bahwa itu memang milik dari legion veteran. Harapan mereka kesaya Cuma satu, tolong sampaikan kepada Pak Kapolri, jangan institusi kepolisian menjadi alat untuk mengusir mereka dari sana. Karena mereka punya surat lengkap, mereka punya data lengkap bahkan di pengadilan pun mereka menang. Itu namanya disini di sertifikat Nomor 5, luasnya 328 hektar didalamnya ada lahan legion veteran seluas 80 hektar. Saya berharap biarlah kita ini tidak bisa memberikan penghargaan apa pun sama mereka. Tapi minimum apa yang sudah diberikan negara Tahun'74 itu kita jaga sehingga kita mampu menghargai mereka sebagai bagian dari memberikan kemerdekaan pada negara ini. Harapan saya juga adalah jangan sampai kasus-kasus berkaitan dengan pertanahan yang konflik antara pengusaha dengan rakyat, institusi kepolisian yang notabene adalah pengayom untuk seluruh masyarakat dipake alat oleh pengusaha, oleh ... pemilik modal untuk melakukan pengusiran, intimidasi bahkan hari ini pun institusi kepolisian dipakai alat untuk turun kepada masyarakat di wilayah tanah yang dikuasai secara fisik maupun secara SK Gubernur oleh legion veteran untuk melakukan proses intimidasi terhadap para penggarap yang notabene adalah eks veteran-veteran di kita.

Itu saja Pak Kapolri saya sampaikan. Ini kenapa seperti itu, karena mereka mungkin berharap dari saya. Karena saya wakil mereka yang duduk di DPR RI yang mungkin mampu menyampaikan aspirasi dari hati mereka yang paling dalam, mereka sudah tua katanya Pak. Mereka tidak perlu diintimidasi, tidak perlu, nanti mati sendiri katanya. Mereka rata-rata usia sudah 85 tahun.

Itu saja, terima kasih atas segera perhatiannya. Dan mohon maaf Pak Kapolri, tolong saya tidak ikhlas kalau mereka di intimidasi. Saya tidak ikhlas kalau mereka yang punya hak secara sah disitu diusir karena kekuatan para pemodal dan uang.

Itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya PKB.
Ada datanya Pak Daeng? Silakan dikasih.
Selanjutnya Pak Karding. Silakan.

F-PKB (H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi., M.Si):

Baik.
Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat sore, dan
Salam sejahtera.**

**Pimpinan Komisi III yang saya hormati,
Bapak/Ibu Anggota Komisi III,
Pak Kapolri beserta seluruh jajaran yang hari ini Alhamdulillah agak lengkap,**

Nama saya Abdul Kadir Karding dari Kapoksi PKB. Tentu saya sesuai dengan Pak Herman Hery saya sepakat bahwa saya mencoba membatasi untuk tidak masuk pada kasus per kasus. Saya ingin meletakkan posisi pengawasan dan tugas, fungsi DPR ini pada proporsi yang saya pahami sesungguhnya.

Yang pertama, tentu saya ingin menyampaikan apresiasi terhadap kepolisian. Sama dengan Pak Parman tadi bahwa telah berhasil melakukan pengungkapan dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok teroris terutama Santoso dan kawan-kawan. Ini tentu awal yang baik dari salah satu kinerja Pak Kapolri kita yang memang expert dibidang itu. Dan tentu kita berharap bahwa, begitu pula pada Pak Kapolda Sulawesi Tengah. Tentu kita berharap ini bisa diselesaikan secara bertahap dan sekarang prosesnya yang saya pahami juga sedang berjalan. Satu per satu yang di gunung mulai turun. Kemarin saya ketemu dengan teman-teman Polda di Sulawesi Tengah. Kita berharap bahwa upaya-upaya ini menjadi upaya awal untuk membangun suatu system dimana kita bisa melakukan diredakialisasi dan terus menerus mengurangi tindakan-tindakan radikal dan terorisme di Indonesia. Karena ini sangat berpengaruh bagi citra bangsa kita.

Yang kedua, kalau mendengar beberapa komitmen dan program prioritas dari Pak Kapolri ketika baru saja di lantik dan pada saat fit and proptest paling tidak ada 11 program prioritas yang disampaikan, diantaranya tadi sudah disebutkan oleh beberapa teman kita mulai dari reformasi internal Polri dan lain sebagainya. Dari 11 yang ada ini memang tentu butuh waktu, butuh upaya-upaya yang serius. Disatu sisi Pak Kapolri pernah menyampaikan bahwa Beliau memiliki tahapan didalam mencapai 11 prioritas ini. Paling tidak dari sisi waktu. Tahapan yang pertama 100 hari, yang berikutnya adalah sampai Desember dan seterusnya, dan seterusnya. Saya Cuma ingin mendapatkan gambaran walaupun tadi dalam penjelasan dari pertanyaan yang disusun oleh Komisi III

begitu komprehensif dijawab beberapa hal yang mendasar yang menjadi pertanyaan public selama ini. Kita ingin dapatkan penjelasan sejauh 100 hari pertama, ini yang sudah dapat dilakukan oleh Wakapolri dan jajaran. Itu yang kedua.

Yang ketiga, menyangkut 177 orang calon Jemaah haji yang diduga ditipu dan sekarang sedang diproses oleh Polri. Kami berharap bahwa ini betul-betul diungkap secara serius Pak. Karena sesungguhnya Filipina ini hanya contoh kasus. Kasus-kasus yang lain sebenarnya banyak terjadi, penipuan atas nama visa haji. Terjadi didaerah-daerah. Hanya selama ini banyak masyarakat tidak tahu cara melapor, yang kedua takut melapor dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan kasus Filipina ini menjadi momentum kita untuk membongkar kasus-kasus yang sama. Kasihan masyarakat kita yang sudah ngumpulin uang sejak lama, menjual sawah mereka hanya untuk berangkat haji. Tetapi ketika saatnya terjadi, dia ditipu. Ini yang harus menjadi beban moral dan langkah kita kedepan. Oleh karena itu saya dari PKB ingin melakukan penekanan supaya ini betul-betul diusut seususutnya dan secara tuntas.

Lalu yang keempat, saya sependapat bahwa dalam hal isu terkait dengan kepolisian akhir-akhir ini mungkin apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Supratman tadi betul bahwa sebaiknya kepolisian menggunakan momentum atau instrument media social dan sebagainya untuk menjawab secara proporsional setiap kebijakan yang dianggap dan bisa mengakibatkan terbangunnya citra yang tidak baik terhadap kepolisian. Kasus misalnya SP3 dan beberapa kasus-kasus lain. Saya yakin kalau ini dijawab dengan waktu yang tepat dan kalimat yang tepat saya kira tidak menjadi rentetan berita yang semakin lama semakin tidak jelas. Jadi saya kira saran saja kalau ini.

Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

PKS.

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, SE):

***Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,***

**Pak Ketua yang saya hormati, dan
Para Anggota yang saya cintai,
Mitra kami,
Pak Tito yang saya hormati, dan jajaran Pejabat Utama.**

Pertama, saya berikan apresiasi. Nampak sekali penjelasan Pak Tito begitu detail, apakah kasus, atau apakah pertanyaan-pertanyaan yang begitu mendasar. Satu hal yang paling penting buat kami Anggota, mau kasus kek, bukan kasus kek, mau permasalahan internal. Artinya apapun masalah yang terikat dengan kepolisian dan

perhubungan mitra kerja kita, itu masalah kita. Dan itu kita perlu bahas. Satu hal yang perlu kita perhatikan, banyak hal yang mendasar sekali ketika di public kadang-kadang sulit diterima, tapi kita seakan-akan terasa mudah menerimanya. Nah ini yang menjadi perlu perhatian. Contoh kasus yang paling mudah tadi sudah terungkap semua kasus SP3 kebakaran hutan. Ini sangat mendasar dan tidak nyaman dilihatnya. Kebakaran lahan dan hutan tahun kemarin itu bukan mudah Pak. Sangat parah. Jutaan orang tidak bisa menjalankan aktifitas, tidak bisa sekolah, bisa tidak keluar, menghisap racun dan asap. Belum lagi penerbangan yang gagal. Penerbangan yang gagal cukup besar sekali. Tapi di ujung hari kita dikagetkan keluarnya SP3 untuk 15 perusahaan dari Polda Riau. Pertanyaannya, apa sih yang terjadi di Republik ini? Akhirnya banyak masyarakat mempertanyakan persoalan ini. Bisa jadi kepolisian menyatakan bahwa kurangnya alat bukti. Bisa jadi, kepolisian bisa menyatakan berarti kurang alat bukti. Akhirnya sebagian masyarakat pun mempertanyakan kenapa tidak dikenakan asas tanggungjawab mutlak atas trik liability. Dimana yang punya lahan harus bertanggung atas kebakaran diwilayahnya. Bukankah seharusnya jika ini ... Polri akan mudah membawanya ke pengadilan. Bersalah atau tidak biarlah pengadilan yang membuktikan. Bila sekarang Polri bersikap silakan saja ajukan pra peradilan atau SP3 tersebut. Pertanyaannya, apakah tidak sama saja dengan mengalihkan beban pembuktian. Yang seharusnya perusahaan memberikan kewajiban beban pembuktian melalui mekanisme, tanggung jawab yang mutlak, beban tersebut harus dialihkan kepada masyarakat melalui mekanisme pra peradilan. Pertanyaannya, apakah ini menjadi pilihan yang tepat. Rakyat yang sudah menjadi korban harus dibebani untuk membuktikan melalui mekanisme pra peradilan. Sedangkan pengusaha diberikan fasilitas Saya melihatnya gak buat citra polisi jadi buruk. Sudah apa lagi foto lagi, kongkow-kongkow,.... Saya pikir ini perlu penjelasan yang lebih baik Pak Tito.

Soal terorisme, ini coba saja dijawab Pak. Agak bingung kita kadang-kadang. Sementara kita tahu Santoso itu teroris dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi begitu meninggal Pak, ada tanda tanya kenapa kok masyarakat begitu datang hadir kepada mereka. Ada apa? Ada pertanyaan hal khusus, ada apa sih masalahnya. Kok bisa teroris yang kita tahu musuh kita, eh didatangi orang ketika mayat dikuburkan ribuan orang dan di medsos muncul. Ini pertanyaannya menjadi apa. Apalagi ada yang mengejutkan lagi, ketika pula ada Anggota DPR yang melakukan kunjungan kesana. Yang saya baca di medsos nih Pak. Kemudian didapati kesimpulan yang ada di Poso bukan teroris kata dia. Tetapi masyarakat yang tidak suka dengan polisi. Ini yang saya baca di media loh Pak, bukan pendapat saya loh. Ini yang saya baca di media. Nah bagaimana membaca ini Pak Tito berkait dengan program Bapak tadi mengenai membangun daya cegah dan daya tangkal dikalangan masyarakat. Ketika terjadi kondisi lapangan seperti ini berarti perlu ada penjelasan. Jadi ada kayak perbedaan antara berita atau informasi yang kita dengar dengan fakta dilapangan.

Selanjutnya, kita menghadapi Idul Adha. Breksit kemarin belum dijamannya Pak Titolah ya. Saya pikir kita perlu mendapat pelajaran yang dalam. Jangan sampai terjadi hal yang seperti itu lagi. Moga-moga pembelajaran ini dari Polda Jawa Tengah apa pun ... lebih punya perhatian dalam lagi persiapan untuk menghadapi liburan yang panjang nanti.

Selanjutnya tentang prostitusi online Pak. Saya sangat apresiasi sekali pada penyidik ... cyber crime. Direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri

yang mengungkap prostitusi online untuk para gay. Saya pikir kasus ini membuat kita ter-rangah. Ternyata terungkap adanya 99 anak yang menjadi korban prostitusi online. Sudah korbannya anak-anak, prostitusi juga dilakukan dengan sesama jenis lagi. Sudah anak-anak, sesama jenis lagi. Lucu. Dan ini di Indonesia lagi anehnya. Kalau di Belanda mungkin okelah ya. Ini Indonesia. Saya kebayang itu anak-anak. Kasus ini Pak Tito seolah mengkonfirmasi berapa pemberitaan media yang menempatkan Indonesia sebagai surga untuk para pedofili. Jadi surga ini Pak buat pedofili. Saya pikir perlu kenceng kerja kita ini. Kalau cyber crime perlu ungkapin mestinya dilapangannya mesti lebih bagus lagi. Jangan sampai akhirnya kita ternyata punya polisi bagus, punya tentara bagus, punya ustad-ulama bagus eh penduduk gay semua. Gak semua sih. Hanya 99 saja itu.

Saya pikir ini perlu perhatian yang dalam dari kita semua. Sebab ke jaringan yang lain ini Pak. Mucikari ini tidak sendirian ternyata. Yang terungkap baru 1 mucikari, sudah dikembangkan ke mucikari lainnya. Lantas bagaimana penanganan kasus berupa, untuk di Bali, Lombok, Batam yang surga pedofili ini. Saya pikir ini kasus berat ini Pak masalah nasib anak bangsa kita. Yang ujungnya adalah yang paling parah lagi itu narkoba. Saya berharap Pak masalah narkoba sudahlah. Jangan basa-basi. Jangan ada dibantu-bantu Pak kalau masalah narkoba. Hantam saja. Sebab ini bercerita generasi muda kedepan Pak. Kalau sekarang ini dihajar saya terus terang di daerah Kalsel Pak, Kalimantan Selatan. Saya sedih ternyata. Begitu masuk ke kampung-kampung itu banyak ... 1,7 Juta, apa namanya zenith. 1,7 juta Pak. Itu baru satu. Masuk dari Trisakti lain lagi 11 Juta. Dari container. Ya sabar dulu Pak Ketua, kita lagi ngomong narkoba. Sebentar.

KETUA RAPAT:

Kita perpanjang dulu ya?

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, SE):

Oke.

KETUA RAPAT:

Kita akhiri jam 05.00 ya.

(RAPAT : SETUJU)

Silakan.

F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, SE):

Dan banyak daerah lainnya Pak. Jadi kalau ada toleran-toleran sama masalah narkoba gak deh, gak ada cerita deh. Memang menarik Pak ... uangnya. Mantap. Benar saya akuin. Wanitanya asyik, duitnya banyak, mainnya enak.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Nasir ringkas. Mau menambahkan.

F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR JAMIL, S.Ag., M.Si):

Terima kasih Ketua.

Tadi Habib itu pengetahuan bukan pengalaman.

Pak Ketua Rapat Pak Desmond,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pak Kapolri beserta jajaran yang hadir disini dan juga Kepala Kepolisian daerah yang juga hadir dalam rapat kerja Komisi III dengan Kapolri pada hari ini yang saya hormati,

Pertama, tentu saya ingin memberikan dukungan kepada Kapolri soal program prioritas yang persentasenya itu sudah mencapai rata-rata di atas angka 30. Dan saya pikir memang kita perlu memberikan support sehingga kemudian program-program ini bisa lebih baik kedepan Pak.

Yang kedua, kalau saya membaca penjelasan Kapolri yang hampir 100 halaman ini. Itu yang paling besar itu narkoba 10 halaman, kemudian juga anggaran 10 halaman dan 1 lagi ini soal terorisme. Ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian. Nah karenanya Pak Kapolri kalau saya membaca penjelasan Pak Kapolri soal narkoba yang mencapai angka 10 halaman ini. Ini barangkali memang kita tidak perlu basa-basi lagi soal narkoba ini karena ini memang sudah menjadi kejahatan yang sangat memprihatinkan. Nah karena itu memang tentu saja kita harus profesional juga sehingga kemudian kita bisa membedakan mana yang namanya korban dan mana pengedar. Nah karena itu dalam hal ini saya berharap kepada kepolisian Republik Indonesia soal narkoba ini benar-benar menjadi perhatian kita semua. Apalagi Presiden sudah menyampaikan bahwa negeri ini sudah masuk dalam kategori darurat narkoba.

Yang kedua itu soal pembinaan yang mendapatkan porsi terbesar didalam penjelasan Pak Kapolri. Pembinaan, artinya pembinaan karir. Disitu juga ada pendidikan. Nah karenanya saya tadi sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri soal *appoint bedding* tadi itu. Saya secara pribadi dan juga barangkali seluruh Anggota Komisi III itu memberikan dukungan soal pembinaan karir Pak sehingga ada *merried system* yang harus kita bangun bersama-sama. Sebab saya percaya 100% kalau pembinaan ini dilakukan dengan *merried system* maka ada kepuasan. Dalam kepuasan menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga dia tidak perlu lagi kemudian berkomunikasi kesana, kemari dan sebagainya. Tapi dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu akan mendapat penghargaan dari Pimpinannya Pak. Jadi memang saya menyadari bahwa memang ada kegelisahan dikalangan internal soal pembinaan karir ini Pak. Nah karenanya *open bedding* yang disampaikan Pak Kapolri ini perlu kita dukung bersama-

sama sehingga kemudian ada kepuasan dalam peningkatan kinerja. Nah karenanya saya berharap soal pembinaan ini Pak Kapolri benar-benar menjadi perhatian kita semua. Dan karena itu dalam konteks program 100 hari Pak Kapolri dengan 10 prioritas tersebut. Saya melihat bahwa memang ada kemajuan soal bagaimana meningkatkan pelayanan public dan kemarin ada 7 Polres di Jawa Timur yang berinovasi dengan menggunakan teknologi untuk mendekatkan pelayanan public. Nah karenanya soal supaya tadi ada disebut-sebut soal Brexit dan lain sebagainya. Maka perlu dipertimbangkan Pak Kapolri soal kebijakan yang kita terapkan di Ibukota soal ganjil genap ini Pak. Dan memang saya baca di media ganjil-genap ini memang ada progresnya. Saya baca di sejumlah media itu ada sekitar 30% masyarakat sekarang sudah menggunakan transportasi umum sudah mereka gunakan. Bahkan ditempat-tempat macet itu sudah 20% lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Jadi ada kemajuan soal ganjil-genap ini. Nah karenanya perlu dipertimbangkan Pak Kapolri kedepan agar tidak terjadi kemacetan luar bisa ketika Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya. Barangkali juga perlu dipertimbangkan apakah ketika mau mudik ganjil-genap duluan, atau yang ganjil hari ini, yang genap besok dan lain sebagainya. Mungkin perlu dipertimbangkan seperti itu supaya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini disamping memang memperbaiki infrastruktur di jalan-jalan.

Jadi ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan karena memang kadang-kadang kita mati kutu ketika melihat proses arus mudik ini Pak bagaimana cara mengatasinya. Dan mudah-mudahan saja kebijakan soal ganjil genap ini didukung oleh Pemerintah Daerah setempat.

Barangkali demikian Pak Ketua, tidak ada hal yang lain. Tadi semua sudah dikatakan dan mudah-mudahan kedepan lebih baik PROMOTER itu (Profesional Modern dan Terpercaya).

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wallaikumsalam Waramatullahi Wabarakaatuh.

Pak Arsul, PPP.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Selamat sore,
Salam sejahtera bagi kita semua.**

Pak Kapolri beserta jajaran yang saya hormati,

Ada beberapa hal yang saya ingin lebih mendalami. Namun secara umum telah disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota yang lain. Namun terlebih dahulu kami ingin juga menyampaikan apresiasi dalam kesempatan Rapat Kerja yang pertama ini Pak Kapolri telah melakukan atau telah melaporkan tentang pencapaian program kerjanya yang menjadi program prioritas 100 hari pertama. Saya kira ini dalam konteks jabatan public sebagai sebuah bentuk akuntabilitas yang saya kira kedepan harus dikembangkan. Dan barangkali untuk mitra kerja Komisi III yang lain ini juga harus dituntut terutama untuk Pak Jaksa Agung juga Pak Taufiq ya.

Pak Kapolri,

Tadi terkait dengan kasus kebakaran hutan. Telah banyak disoroti. Namun ada 1 hal yang menggelitik saya. Kalau kita kaitkan dengan system hukum yang ada di kita. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus-kasus yang terkait dengan ... ini tidak hanya pada Polri. Tetapi juga ada PPNS yang berada dibawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Nah saya kebetulan memiliki dan mendapatkan satu bentuk contoh dari SP3 yang diberikan oleh Polda Reskim khusus Polda Riau dari 15 yang SP3-nya dihentikan. Pertanyaan sederhana saya Pak Kapolri, karena bagaimana pun sebagai penegak hukum Polri adalah independent namun tentu dalam konteks mensukseskan program Pemerintah juga termasuk didalam melakukan pemadaman dan juga minimalisasi dari akibat-akibat kebakaran hutan dan lahan (KAHUTLA) ini. Pertanyaan simplenya yang menggelitik adalah apakah dalam proses pengeluaran SP3 ini atau dalam proses bahkan penyelidikan dan penyidikan itu Polri, penyidik Polri juga melakukan koordinasi dengan PPNS ataupun dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Sebab kalau kita ikuti di media massa maka terkesan bahwa Kementerian LHK ini juga kecewa, tidak puas dengan apa yang telah dia lakukan oleh penyidik Polri mengeluarkan SP3 ini. Juga dari sisi teknis penanganan perkara. Ada juga yang menggelitik saya, misalnya tentang saksi ahli, saksi-saksi ahli yang menjadi dasar untuk pengeluaran SP3 ini. Saya lihat saksi ahlinya adalah ahli dari PLH Provinsi Riau. Kemudian juga ada dari ahli kebakaran hutan dan lahan. Pertanyaannya kemudian apakah tidak dikembangkan upaya untuk mencari saksi-saksi ahli yang lain yang mungkin mempunyai perspektif lain. Saya ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Polda Riau ketika Kapoldanya tapi yang jelas kalau tidak salah adiknya Pak Rektor UGM pada saat itu Pak Tjipto kalau gak salah itu. Pak Tjiptadi ya. Itu bisa menemukan kasus-kasus yang terkait dengan lingkungan hidup maupun kebakaran hutan ini, dengan antara lain memanggil saksi-saksi ahli yang basisnya itu sangat luas. Antara lain dari institute pertanian Bogor dan juga dari fakultas kehutanan UGM. Nah ini saya lihat yang belum kelihatan. Ini sepertinya adalah bahwa ahlinya kalau boleh saya bilang ini ahli yang secukupnya saja yang local. Dan tentu yang paling menimbulkan kemudian pertanyaan itu tadi koordinasinya karena ternyata Kementerian LHK itu menyatakan ketidakpuasannya terhadap SP3 ini.

Yang berikutnya masih terkait juga dengan kebakaran hutan ini tentu yang harus menjadi concern bersama. Jangan-jangan nanti Singapura dengan *Singapura trans boundary his pollution act Tahun 2014*. Ini malah justru lebih bisa menemukan alat bukti

dan kemudian melakukan proses hukum berdasarkan *trans boundaries his pollution act* ini di Singapura. Kalau saya ikuti di media misalnya di Duta besar Singapura itu malah sudah mengidentifikasi 6 perusahaan Indonesia yang mereka telah percayai telah melakukan pembakaran lahan untuk membuka perkebunan dan masih melanjutkan penyelidikan ini. Saya tidak tahu penyelidikannya dengan cara apa. Mungkin dengan menggunakan *drown* dan jangsan-jangsan yang bekerjasama dengan ... *drown*-nya LHK malah Pemerintah Singapura. Dan kemudian yang menariknya ada 2 perusahaan dari media ini yang merespon perintah pengadilan di Singapura terkait dengan kebakaran lahan meskipun tidak disebutkan siapa 2 perusahaan ini.

Nah ini saya kira hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. SP3 memang sesuatu yang sah. Kalau memang tidak cukup alat buktinya memang sebuah penyelidikan perkara pidana harus dihentikan. Namun tentunya kalau kemudian masih terbuka karena SP3 juga bukan suatu final and ... *adjustment* tentu masih bisa dibuka. Saya berharap jajaran Polri melakukan koordinasi dengan LHK untuk mengkaji apakah SP3 ini memang sesuatu yang bisa dipertahankan atau ada kemungkinan untuk bisa dibuka kembali. Saya kira itu dari kami Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Arsul.
Selanjutnya Nasdem.

F-NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.S):

Baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Yang saya hormati Pimpinan,
Kemudian yang saya hormati Kapolri beserta seluruh jajarannya,**

Dalam kesempatan ini saya sepenuhnya tidak banyak hal yang ingin saya tanyakan tetapi karena perlu kita tanyakan, kita perjelas. Kita ingin tanyakan sedikit. Karena nanti teman saya juga mungkin ingin bicara. Ini ada 2 teman baru Pimpinan di Komisi III. Pertama namanya Pak Ahmad Ali dibelakang disini. Kemudian Pak Ahmad Saroni.

Pertama, ini penting. Paling tidak ini adalah titipan dari istri saya ini Pimpinan. Pak Kapolri, berkaitan dengan sebuah trading topik. Karena dia katanya dari tetangganya juga berkaitan dengan sebuah kasus menyangkut dengan bahan kadaluarsa. Ini penting, kenapa? Karena ada hal yang harus kita jelaskan. Kalau ini adalah benar terjadi maka menurut saya puluhan anak-anak kita, anak saya juga itu telah memakan bahan kadaluarsa di pizza hut ini dan barugame udong ini. Kalau tidak benar, ini berbahaya kepada perusahaan itu. Karena ini bisa saja menjadi fitnah. Itu adalah persaingan bisnis. Karena begitu menurut saya itu segera diperjelas oleh pihak kepolisian. Saya menginginkan ini adalah didudukkan persoalan secepatnya. Kalau tidak didudukkan

persoalan ini secepatnya. Saya khawatir nanti kepada perusahaan ini. Perusahaan ini akan menjadi masalah. Dia ini akan menjadi sasaran kecurigaan dari masyarakat. Tetapi kalau benar saya berharap harus ditindak. Ini adalah perusahaan yang telah menggunakan bahan kadaluarsa ini. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini juga berkaitan dengan kebakaran hutan. Kemarin itu saya menganggap itu adalah hal yang tidak perlu terjadi di Rokan Hulu. Ada penyeragaman kemudian ada penyanderaan terhadap petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan mereka disekap. Kemudian diperlakukan agak kasar menurut saya. Itu membuat nanti petugas-petugas kita, itu adalah demoralisasi. Karena itu, ini menurut saya harus disikapi dengan keras oleh pihak kepolisian. Dan harus kita ingat saya ini mendapat laporan. Mungkin juga ini harus dicek karena ini sangat spekulatif sifatnya. Tetapi sejumlah orang yang melakukan pembakaran hutan itu, itu dibiayai. Dibayar dengan sabu, dengan candu. Jadi ketika setelah mau bakar, malamnya itu diberikan obat tersebut. Itu adalah saya mohon dicek benar atau tidak tersebut. Tidak saya tuduhkan kepada perusahaan Andika Permata Sawit Lestari. Saya tidak menuduh perusahaan ini yang melakukan penyekapan kemarin tetapi sebelumnya. Karena itu menurut saya ini coba dicek benar. Kalau itu adalah berbahaya sekali menurut saya. Dan jaringan itu sampai ke Jambi, setelah Jambi kemudian jaringan itu ternyata berkaitan dengan sebuah negara lain yang memberikan candu tersebut. Jadi yang suruh bakar dari negara lain dengan dibayarkan itu. Itu menurut saya agak dramatis menurut saya.

Nah itu yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini.
Demikian dari saya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Ali silakan.

F-NASDEM (AHMAD ALI):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Mitra Komisi III yang beserta jajarannya yang saya hormati,**

Saya ingin menambahkan sedikit saja tentang persoalan terorisme karena kebetulan ini dari Dapil saya Pak Kapolri. Masalah Santoso. Kebetulan saya dari Dapil Sulawesi Tengah. Sehingga ada hal yang saya mau ingin tanyakan dan kemudian mendengarkan penjelasan dari Pak Kapolri tentang penindakan terorisme di Poso. Ketika Pak Tito dulu menjadi Ketua BNPT terus kemudian melihat persoalan, kemudian menggunakan prinsip kontra teroris dalam penindakan, terus kemudian ketika BNPT baru sekarang. Dia lebih pada pencegahan. Nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian hubungan ... antara 2 institusi ini dalam penanganan tentang kasus teroris.

Terus kemudian siapa, institusi mana yang lebih punya kewenangan dalam melaksanakan penindakan terhadap teroris ini. Ini mungkin perlu saya ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari Pak Kapolri. Karena kenapa tadi ada banyak pertanyaan. Ketika kita berbicara Santoso yang katanya teroris dan kalau kita tarik lebih jauh lagi akan kaget, kemudian mengetahui fakta, siapa sebenarnya Santoso ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa begitu “dicintai” oleh masyarakat yang ada di wilayah pesisir Poso. Ini pertanyaan yang mungkin juga harus kita jawab. Nah bahwa ada pernah yang mengatakan bahwa ada Anggota DPR yang pernah berkunjung ke sana yang mengatakan bahwa disana itu bukan teroris tapi adalah kelompok orang yang anti polisi. Juga ada kebenarannya. Karena memang faktanya disana, dulu Poso adalah daerah konflik terus kemudian dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir tidak lagi terjadi konflik antar agama tapi yang terjadi adalah konflik antara kelompok radikal dengan kepolisian. Sehingga ini kemudian menjadi satu PR yang perlu harus kita jawab.

Terus kemudian, saya mencoba memahami pikiran Ketua BNPT hari ini untuk lebih mengedepankan tindakan pencegahan. Karena kenapa? Kalau saya boleh menganalisa bahwa sesungguhnya melebarnya paham. Katakanlah kelompok teroris di Poso itu, ini karena kegagalan diteksi dini tentang paham atau lahirnya kelompok baru. Karena Santoso dan Basri di Poso ini bukanlah personal atau komandan yang seperti apa yang digambarkan sesungguhnya selama ini. Ini orang yang susah untuk kemudian yang dari pribadi yang saya tahu, yang saya kenal tentang Basri, Santoso. Sangat bertolak belakang dengan apa yang kemudian apa yang hari ini di publish oleh media. Ini bukanlah sesungguhnya kelompok yang berbahaya dalam “secara ideology” karena boleh saya katakan mungkin di forum ini bahwa ... ini ngaji pun tidak tahu. Ini fakta. Karena ini sudah mulai meluas berita tentang ketokohan. Cuma pertanyaan kita hari ini, kenapa dengan figure seperti ini kemudian begitu dicintai faktanya kemarin ketika dia dikuburkan ribuan manusia yang hadir di pemakaman tersebut. Disisi lain berita tentang ini, tentang figur ini menjadi sangat. Tetapi mungkin perlu ada pendekatan baru oleh kepolisian untuk kemudian mengembalikan citra atau persepsi. Jadi saya pikir salah satu tugas penunjukkan Pak Tito hari ini sebagai Kapolri dalam hal ini adalah untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat, public terhadap kondisi kepolisian hari ini. Sehingga kemudian kedepan kita berharap tidak lagi terjadi hal seperti itu. Artinya masyarakat harus diberi pemahaman, pencerahan yang lebih pas. Sehingga pemahaman-pemahaman seperti apa yang kemudian menjadi atau idola, katakanlah seperti itu untuk masyarakat yang disana. Karena saya secara pribadi sebagai masyarakat yang pernah tinggal lama di Poso. Pak Tito pernah. Punya perjalanan dengan saya dulu. Saya pernah ditangkap dulu oleh Pak Tito waktu di Poso. Ini perjalanan dengan Beliau kemarin. Artinya di duga. Saya bukan teroris karena saya tidak pernah diadili oleh pengadilan apa pun bahwa saya adalah teroris. Tapi pernah diduga karena memang saya pernah tinggal di Poso, dan saya lama di Poso sehingga saya mengenal betul kondisi masyarakat yang ada disana. Sehingga saya berharap tentunya kondisi seperti sekarang ini jangan lagi terjadi. Apapun usaha atau apa pun upaya yang kita lakukan, bagaimana mengembalikan citra kepolisian untuk menjadi salah satu institusi yang dicintai oleh masyarakat.

KETUA RAPAT:

Berhubung waktu ya.

F-NASDEM (AHMAD ALI):

Oke.

Terima kasih Pimpinan. Sampai situ saja.

Terakhir satu, ini titipan dari Dapil kebetulan saya baru pulang reses. Ini mungkin Pak Kapolda persoalan yang tertinggal di Pilkada 2015. Ada aduan masyarakat, ada laporan masyarakat di kepolisian di Polres Banggai tentang tindak pidana Pemilu yang sampai hari ini belum dijawab oleh kepolisian. Tidak penting menurut saya, bagaimana akhir dari proses hukum ini. Tapi yang terpenting adalah kepastian hukum bagi masyarakat. Karena proses ini sudah begitu panjang digelar di Polres, digelar di Polda, kemudian ditarik di Mabes. Sampai hari ini belum ada kepastian hukum apakah aduan ini di tindaklanjuti atau punya alat bukti yang cukup atau tidak. Kalau kemudian dia memenuhi unsur untuk kemudian segera ditingkatkan, kalau dia tidak memenuhi unsur saya pikir juga adalah hak kepolisian untuk meng-SP3-kan.

Saya pikir ini yang saya sampaikan, terima kasih.
Sekian.

***Wabillauhitaufiq Walhidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Berhubung waktu. Waktu kita batasi, karena memang sudah dua-dua.
Pak Akbar, maaf waktunya. Kalau kita lanjutkan ini pasti kita sampai malam.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Saya tambahkan sedikit Pak Kapolri.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Kapolri untuk menjawabnya. Ringkas saja.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Pimpinan, Pak Desmond.

Gak, saya dari tadi datang kok. Sebentar sedikit saja. Ini pertanyaannya masyarakat juga sih.

KETUA RAPAT:

Kalau ... kita sampai malam.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Tidak apa-apa. Kita main sampai malam.

KETUA RAPAT:

Anda datang jam 03.00, pulang jam 05.00.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Gak dong. Saya datang dari tadi. Jangan saya diajak ribut disini Pak Desmond. Dari tadi, anda tidak lihat saya.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Kapolri jawab dulu Pak.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Jangan begitu dong Pak Desmond. Saya punya ... mempertanyakan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

KAPOLRI:

Mohon ijin Bang Faizal.

F-NASDEM (AKBAR FAIZAL):

Pimpinan, kalau begitu saya tidak didengarkan disini. Saya keluar dari sini.

KAPOLRI:

Baik.

Terima kasih banyak atas segala pertanyaannya. Saya jawab satu per satu.

F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.Si.):

Interupsi dulu Kapolri.

Pimpinan,

Begini, karena tidak dibatasi berapa orang kita bicara tadi. Saya berharap kepada Anggota Fraksi Nasdem, satu orang lagi diberikan karena katanya ada sedikit. Demikian.

KETUA RAPAT:

Iya, ini masalahnya Pak Taufiq dari awal 2-3 sesuai dengan proporsi, ada yang menggunakan. Tolong untuk pengertiannya. Kalau mau saya akan lanjutkan sampaikan malam karena waktunya tinggal setengah jam. Dengan pertanyaan yang banyak saya mengakomodir semua kepentingan yang disampaikan. Kalau saya tambah, masih ada Masinton, masih ada ..., masih ada ..., semuanya ada masih. Saya serahkan saja. Bagi saya tidak masalah. Kalau ..., Beliau apakah sampai jam 05.00 kita perpanjang saya serahkan ke Bapak-bapak.

KAPOLRI:

Oke, saya lanjut Pak.
Terima kasih.

Jadi terima kasih masuknya tadi untuk Pak ... mengenai masalah mekanisme rapat yang segyogya tidak membicarakan kasus per kasus atau kasuistis tapi lebih strategis. Kami dari Polri prinsipnya apa yang ditanyakan selagi berkaitan dengan tugas polisi kami siap, namun kalau ditanya yang lebih spesifik, lebih strategis memang akan lebih baik terutama menyangkut masalah kebijakan karena memang kalau bicara kasus per kasus secara detail itu lebih baik digelar oleh dengan melibatkan tim penyidik. Karena tim penyidik yang tahu persis secara detail pertanyaannya, jawabannya. Sedangkan kami mungkin yang hadir disini Kapolri, Kapolda dengan 430.000 anggota, puluhan ribu penyidik, memang kalau ditanya persis satu per satu sampai detail betul kita hanya mengetahui hal-hal yang bersifat umum, generalist tidak spesifik. Kami mempersiapkan jawaban-jawaban sesuai pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dulu. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan spontan yang bersifat kasuistis yang spesifik otomatis kami tidak jawab secara detail dan itu lebih baik ke mekanisme dibuat semacam panitia khusus tentang kasus-kasus tertentu dan kita lakukan secara tertutup. Saya terima kasih masukan dari Pak Herman Heri.

Kemudian Ibu Dwi Ria Latifa tadi mengenai masalah karhutla kami sependapat. Ini kan masalah-masalah yang sudah naik di media massa dan sekaligus juga menjadi perhatian masyarakat lebih dari itu juga dampaknya luas di masyarakat. Dan itu menjadi salah satu menjadi atensi daripada negara. Mengenai masalah kasus-kasus ini yang sudah di SP3 dan lain-lain telah kita jelaskan tadi bahwa itu kasus-kasus sudah pernah di SP3 berdasarkan alasan-alasan tadi. Alasan-alasan hukum yang tidak terdapat cukup bukti dan lain-lain. Dan seingat saya dari Komisi III pada saat reses juga sudah langsung kesana timnya. Langsung berhadapan dengan Kapolda dan para penyidik langsung dan sudah diberikan penjelasan juga saat itu. Nanti Kapolda juga bisa menambahkan.

Nah kemudian berkaitan dengan masalah foto-foto, kami juga sudah mengirimkan tim. Sudah mengirimkan tim dari Propam. Ini ada Pak Kadiv Propam disini untuk turun kesana melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan sementara bahwa foto-foto itu bukan kongkow-kongkow. Ini kan kongkow bahasanya Bahasa media. Media boleh siapa saja menulis, silakan saja. Tapi kalau kongkow itu kan bahasanya seperti teman dekat segala macam. Yang terjadi memang pada saat itu yang dari laporan Propam yang saya terima itu tim dari Mabes Polri datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan kasus Meranti. Peristiwa meranti yang keributan meranti. Memang saya menugaskan tim untuk berangkat yaitu pada saat itu ada 2 pejabat utama, ketika setelah terjadi kerusuhan meranti 1 Pak ... Kapolri. Beliau juga hadir disini, yang kedua Kadiv Propam. Dan kedua Kadiv Propam turun langsung ke meranti yang penyerangan terhadap Polres. Ada anggota yang meninggal dunia maupun tersangka yang meninggal dunia. Dan kelanjutannya 3 orang anggota kepolisian disana dilakukan penahanan. Nah ini juga sama. Kita bukan ingin mengorbankan anggota. Tapi kalau terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran didalam internal kami juga harus melakukan langkah-langkah karena organisasi kita tidak pernah mentolerir ada pelanggaran-pelanggaran misalnya kekerasan berlebihan terhadap tersangka yang sudah menyerah. Tidak boleh. Kita ingin menunjukkan bahwa hukum tegak termasuk didalam polisi sendiri.

Nah kemudian disaat itu ada tim yang sedang turun menangani kasus meranti ini. Yang namanya teman satu liting kadang-kadang seperti teman-teman di Akpol ini kalau turun datang ke satu daerah, biasanya teman 1 litingnya akan datang juga bertemu. Nah ini kebetulan yang datang ini teman-teman 1 litingnya datang juga ingin menemui. Kebetulan sambil menanyakan peristiwa yang di meranti. Nah saat mereka mau makan-makan di restoran, kemudian ketemulah dengan pemilik restoran berikut ada beberapa orang yang menurut pemeriksaan tidak begitu dikenal oleh yang lain. Yang dikenal hanya 1 orang dari petugas ini. Nah kemudian say hello salaman. Dari semua yang di foto itu informasinya hanya 1 saja. Pengusaha yang memiliki lahan sawit, yang lain tidak ada. Yang lain bukan pengusaha sawit. Dan pengusaha sawit ini tidak terkait dengan peristiwa yang SP3 itu. Jadi kalau dikaitkan bahwa. Pertemuan itu dikaitkan dengan peristiwa SP3 yang lahan sawit yang 15 itu tidak akan tepat karena memang bukan kaitannya dengan SP3 atau orang yang terkait dengan SP3 yang 15 lahan sawit itu. Cuma memang ada 1 pengusaha yang dia memiliki lahan sawit yang kebetulan juga ada disitu. Dan setelah bertemu sebentar kembali ke meja masing-masing. Itu informasi yang kita terima. Namun untuk mendalami ini Pak Kadiv Propam sudah menurunkan tim dan tim. Saya sudah perintahkan untuk lanjutkan pemeriksaan dalam betul sampai nanti mereka akan dipanggil ke Mabes Polri minggu-minggu ini. Nah itu yang kita lakukan.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):

Pimpinan.

Sebentar Pak Kapolri. Jadi persoalan Riau ini kalau dia tidak akan menarik perhatian begini Pak, kalau dia dianggap proses terbit SP3 itu normal Pak. Nah kenapa dia menjadi perhatian public, karena memang ini juga menjadi atensi Presiden. Bahkan Presiden juga sudah berkali-kali ke wilayah kebakaran hutan dan lahan, baik itu di Kalimantan maupun di wilayah Sumatera termasuk di Riau. Nah ini kan tidak sejalan kelihatan Pak.

Pertama, dari 15 perusahaan yang di SP3 itu Pak. 8 itu pernah dijadikan tersangka pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015. Dan kemudian diberikan SP3 kembali. Masa kepada perusahaan yang jelas-jelas pernah diduga melakukan pembakaran lahan masih diberikan SP3 sampai sudah 3 kali loh Pak. ini kan menampakkan sisi profesionalisme yang sedang Bapak bangun itu diruntuhkan. Kami mendukung penuh langkah Pak Tito sebagai Kapolri untuk melakukan pembenahan dan mendorong profesionalisme Polri ini. Tapi itu diruntuhkan kemarin dengan terbitnya SP3 ini.

Kemudian perusahaan yang ada PT Ruas Utama Jaya itu merupakan tersangka kasus penebangan liar pada Tahun 2007 dan 2009, perusahaan itu juga mendapat SP3 pada Tahun 2013, 2014 dan 2015. Padahal Kementerian Lingkungan Hidup menjadikan PT RUJ itu sebagai tersangka. Sama Polda Riau di SP3-kan. Nah itu kenapa kita tanyakan, kenapa kita dalam. Nah inikan kalau kita lihat dari data, disini ada dari 275 laporan polisi diatas, ini jumlah tersangka 166. Terdiri dari 144 perorangan dan 22 korporasi dan sebagian itu kita SP3-kan. Nah berkaitan dengan korporasi, kita ini melunak pak, sangat lunak. Yang say abaca sampai hari ini adalah Polri itu RI-nya Republik Indonesia Pak, kepolisian Republik Indonesia. Bukan kepolisian colonial. Ini yang saya takutkan adalah, yang saya khawatirkan. Ini lama-lama keberpihakan kita itu sama pemodal Pak dan itu terjadi. Saya tidak ingin. Ini yang saya harus diubah Pak. Kenapa saya ingin ini menjadi konsen kita serius. Polri itu RI-nya Republik Indonesia Pak, bukan polisinya pemodal. Tadi kalau masalah perorangan kita cepat. Perorangan cepat langsung ke pengadilan Pak, berkaitan dengan korporasi kita negosiasi. SP3 itu negosiasi.

KETUA RAPAT:

Pak Masinton, fokusnya sudah selesai.

F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH):

Ya sebentar Pak. Itu saya minta waktunya itu. Nah karena apa? Kalau polanya begitu terus Pak, ini kan Cuma pendekatannya selalu pelaku pembakaran lapangan. Kita tidak mampu menjangkau korporasi ini, dia punya tanggungjawab. Ada kelalaian dan segala macam disana.

Nah terus kemudian, ini juga berkaitan dengan rakyat Pak. Buruh di Belawan. Saya pernah laporkan Pak ke Pak Kabareskrim, Pak Haridono waktu itu. Kita Panja. Masalah korupsi pengadaan rumah buruh Pak di Belawan itu dari 2007 sampai sekarang itu tidak selesai pembangunannya. Buruh dipungutin terus. Dan ini sudah dilaporkan ke Polda Sumut Pak. Lembek disana. Ini juga menyangkut buruh. Nah saya minta Pak ini di supervisi kasus ini. Karena ini menyangkut buruh di pelabuhan Belawan. Saya pernah menjadi buruh Pak. Jadi selama dari sejak 2007 sampai sekarang mereka mengontrak yang seharusnya sudah punya rumah. Upah setiap bulan itu dipotong Pak. Sampai sekarang mereka tidak punya rumah.

Nah saya minta ini supaya menjadi *concern* Pak. Polda Sumut kalau tidak mampu menanganinya, tolong Mabes Polri mensupervisi atau bahkan mengambil alih dugaan korupsi di pengadaan rumah buruh pelabuhan Belawan ini.

Terima kasih Pak Kapolri.

KETUA RAPA:

Silakan Pak Kapolri.

F-NASDEM (Drs. TAUFIQULHADI, M.S):

Pak Desmond, sebelah kiri. Wah pak Desmond gak adil tadi. Kepada teman saya Pak Akbar tidak diberikan waktunya tadi.

KETUA RAPAT:

Ini interupsi Pak. Dia tambah sendiri. Mohon juga pengertiannya.

KAPOLRI:

Baik Pak.

Karena memang, mudah-mudahan masih dalam satu rangkaian isu yang sama tentang masalah Kahutla tadi. Jadi SP3 yang 2013-2014 mungkin kasusnya beda. Tidak bisa kita mengeneralisir kasus itu. Kasus itu hanya sebagai indikasi bahwa kemungkinan ada pelanggaran. Tapi dengan adanya SP3 menunjukkan juga bahwa yang bersangkutan tidak salah. Kita tidak kenal ya. Tidak salah. Harusnya bisa di *challenge* juga dengan pra peradilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Nah kita tidak bisa mengeneralisir bahwa orang-orang yang sudah di SP3 dilaporkan, kemudian di SP3, dilaporkan di SP3 lagi itu pasti salah. Sehingga berikutnya pasti salah. Namanya berpikir ... paling kita lakukan dalam penyidikan adalah bagaimana proses ... artinya ada hubungan sebab-akibat tiap-tiap kasus. Tapi prinsipnya masukan ini menjadi masukan bagi kami untuk lebih mengintrospeksi dan mengevaluasi dalam rangka penanganan kasus kebakaran hutan. Nah untuk itu saya juga sudah diskusi dengan Pak Kabareskrim. Prinsipnya bahwa semua kasus SP3 yang akan di SP3 oleh wilayah dalam kebakaran hutan harus digelar di Mabes Polri. Nanti di Mabes Polri kemungkinan besar kita akan bentuk Satgas. Satgas yang melibatkan dari Bareskrim maupun dari Dipkum, dari Propam dan dari Idwasum. Jadi pengawasnya banyak. Ini khusus untuk kasus kahutla supaya tidak. Kita tahu bahwa ini adalah hal penting yang memiliki kebijakan Pimpinan Negara dan menjadi masalah nasional dan internasional. Itu yang akan kita lakukan untuk kedepan ini. Tidak boleh kita mengeluarkan instruksi, tidak boleh SP3 dilakukan sendiri tapi harus digelar sekali lagi di Mabes Polri dan bahkan mungkin kita akan membentuk juga Satgas nantinya untuk penanganan kasus-kasus yang menonjol terutama yang berkaitan dengan masalah korporasi.

Kemudian kalau untuk masalah buruh. Saya kira terima kasih masukannya. Ya nanti sudah dicatat oleh Pak Kabareskrim. Kita akan melakukan supervisi kedepan kasus itu.

Kemudian mengenai masalah. Tadi sudah saya jawab, mengenai masalah foto-foto tadi yang menanyakan tadi. Ini prinsipnya tadi, sudah kita jawab, bagaimana kronologi ceritanya. Dan kemudian masih kita dalami. Kita akan panggil ke Mabes Polri kalau memang ada pelanggaran misalnya masalah, tapi jelas ini tidak begitu terkait

dengan kasus SP3. Karena orang-orang yang difoto itu tidak ada yang terkait dengan SP3 15 kasus, tidak ada. Ini yang mungkin perlu kami klarifikasi dalam kesempatan ini. karena sudah berkembang di media-media social seolah-olah ada pihak yang mengkaitkan bahwa SP3 itu atau kongkow-kongkow dalam “kongkow” ini dalam rangka kongkalikong SP3. Itu seolah-olah digiring kesana. Kenyataannya tidak. Kenyataannya tidak ada satu pun orang yang ada disitu terkait dengan SP3. Yang ada 1 orang pengusaha sawit yang ada disitu tapi tidak ada hubungannya dengan masalah SP3 kasus yang 15. Dia bukan termasuk yang 15. 15 korporasi.

Kemudian mengenai masalah TPPO tadi. Untuk masalah yang di Kepri Bu Kapal akan kami berikan atensi Bu. Memang kami dapat laporan, memang kapal patrolinya sudah kurang bagus disana. Tapi kalau tidak salah disana juga ada dari Div. polo air kalau saya tidak salah. Dari Mabes yang diperbantukan disana. Untuk yang Poldanya sendiri, Polresnya yang kurang.

F-PDIP (DWI RIA LATIFA):

Interupsi Pimpinan.

Berkaitan dengan kapal. Yang dikirim itu mobil patwal. Yang diperlukan Kepri itu kapal laut, karena apa? karena memang daerah perbatasan, kepulauannya ribuan. Jadi menurut saya sasarannya yang harus dipikirkan sesuai dengan kebutuhan. Ditambah itu daerah perbatasan terduga teroris sudah ada disitu kemarin. 6 yang ditangkap, kemudian ditambah narkoba nomor sekian, ditambah lagi trafiking limbah dari kampungnya Pak Benny Karman, dan lain sebagainya. Kampungnya Pak Herman Heri. Jadi maksud saya, tolong itu dijadikan satu prioritas untuk masalah ini.

Terima kasih.

KAPOLRI:

Terima kasih.

Tadi Pak ... juga menyampaikan hasil pengecekan terakhir ada 2 kapal, satunya memang sudah rusak. Kita akan ... atensinya Bu. Karena disitu kasus penyelundupan banyak juga.

Kemudian masalah tadi Pak Junimart masalah anggaran. 2,9 Triliun, ini dipotong, apakah akan berpengaruh dalam penegakan hukum. Tadi disampaikan, itu memang pasti ada pengaruhnya tapi untuk program-program prioritas ini kita tetap jadikan atensi. Pemotongan banyak dibagian-bagian seperti BMP (Bensin, Minyak dan Pelumas), kemudian biaya-biaya perjalanan, biaya-biaya rapat, ATK dan lain-lain. Tapi saya kira ini bukan hanya dialami oleh Polri saja. Hampir semua instansi semua terkena dampak penghematan ini. Kami berusaha tetap mengikuti karena sudah ini keputusan dari atas, kita tetap melaksanakan penghematan ini dengan menyeleksi dibagian-bagian yang

.....

